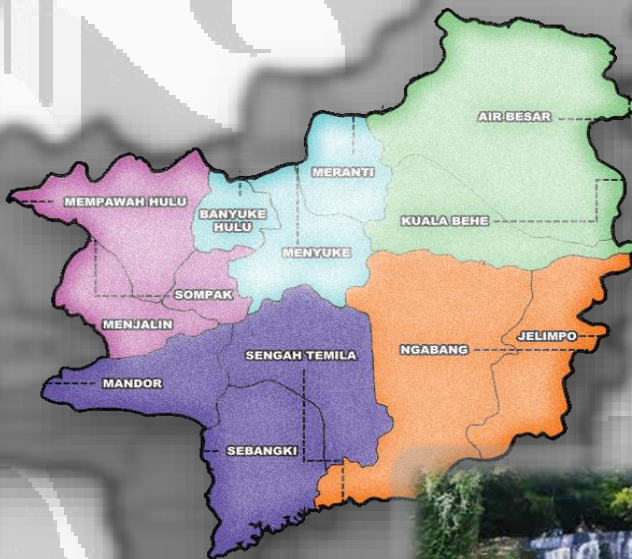




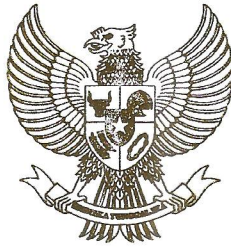
**Peraturan Bupati Landak Nomor 13
Tahun 2024**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(P-RKPD)
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024**



**Mewujudkan masyarakat Kabupaten Landak yang maju dan mandiri
melalui percepatan penyediaan infrastruktur dasar**





BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

- (2) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi PD dalam menyusun Perubahan Renja PD; dan
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.
- (3) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. Penyiapan rancangan perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024;
 - b. Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024; dan
 - c. Penetapan perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024 :

- a. Pemerintah Kabupaten Landak menggunakan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 sebagai arahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan
 - b. PD menggunakan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dengan DPRD.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Perubahan RKA PD Tahun 2024 hasil pembahasan bersama DPRD dengan PD Tahun 2023.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbeda dari hasil pembahasan dengan DPRD, maka Pemerintah Kabupaten Landak menggunakan RKPD Tahun 2024 hasil pembahasan dengan DPRD tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR 13



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

[Handwritten signature]
DARMAWARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Dasar Hukum	7
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	10
1.4. Maksud dan Tujuan	11
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	12
BAB II	14
HASIL EVALUASI TRIWULAN II (TRIWULAN KEDUA) TAHUN 2024	14
BAB III	78
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	78
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	78
3.1.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2024	93
3.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	96
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	96
3.2.1. Analisis Kinerja Keuangan Periode Tahun 2021-2023.....	98
3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	100
BAB IV	102
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	102
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	102
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024.....	113
4.2.1. Pencapaian RPJMN Tahun 2020-2024.....	113
4.2.2. Telaahan Rancangan RKP Tahun 2024.....	118
4.2.3. Penetapan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Landak	130
4.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan RKP	138
4.4. Sinkronisasi Sasaran Pembangunan dan Target Kinerja Kabupaten Landak dengan Sasaran Pembangunan dan Target Kinerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024	181
BAB V	182
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	182
BAB VI	373



KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	373
BAB VII.....	395
P E N U T U P.....	395



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Terhadap Hasil RKPД Kabupaten Landak Triwulan II Tahun Anggaran 2024.....	15
Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Landak (persen) 2018-2023.....	80
Tabel 3. 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Landak.....	81
Tabel 3. 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Landak (miliar rupiah), 2018-2022.....	82
Tabel 3. 4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Landak, 2018-2023.....	86
Tabel 3. 5 Pertumbuhan dan Kontribusi Kabupaten Landak terhadap Provinsi Kalimantan Barat.....	90
Tabel 3. 6 Proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Landak Tahun 2024.....	93
Tabel 3. 7 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Landak.....	94
Tabel 3. 8 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat dari Sisi Pengeluaran tahun 2023 - 2024.....	95
Tabel 3. 9 Faktor Umum yang Mempengaruhi Perubahan Pendanaan dalam RAPBD.....	97
Tabel 3. 10 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Landak.....	98
Tabel 3. 11 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Landak.....	99
Tabel 3. 12 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Perubahan RKPД Tahun 2024..	100
Tabel 4. 1 Tujuan RPD Kabupaten Landak.....	102
Tabel 4. 2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Landak 2023-2026.....	104
Tabel 4. 3 Proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Landak Tahun 2024.....	132
Tabel 4. 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 ..	134
Tabel 4. 5 Keselarasan Antara 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Daerah.....	138
Tabel 4. 6 Program Prioritas Pembangunan, Sasaran Pembangunan dan Target Tahun 2024 Kabupaten Landak yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional yang Tertuang dalam RKP.....	139
Tabel 5. 1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Landak.....	183
Tabel 6. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Landak Tahun 2024.....	373
Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	374



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD	7
Gambar 1. 2 Keterhubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan	11
Gambar 3. 1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Landak.....	80
Gambar 4. 1 Arahan Utama Sebagai Strategi Dalam Pelaksanaan Misi Nawacita Dan Pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045.....	115
Gambar 4. 2 Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan (2023-2026)	131



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD/RPD merupakan penjabaran dari RPJMD/RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 adalah tahun ke - 2 (dua) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026.

Amanat Pasal 346 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyiratkan bahwa penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Landak Tahun 2024 selain berpedoman pada RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026, dan pada Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan melalui serangkaian tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahapan yang dilalui meliputi: 1. Persiapan Penyusunan; 2. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD; 3. Penyajian Rancangan Perubahan RKPD; 4. Perumusan Rancangan Akhir; dan 5. Penetapan.

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2024 tentu saja memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan II yang menggambarkan bahwa perlu dilaksanakannya perubahan terhadap RKPD Tahun 2023 ini. Hal yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan perubahan RKPD didasari pada:

1. Perkembangan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah;

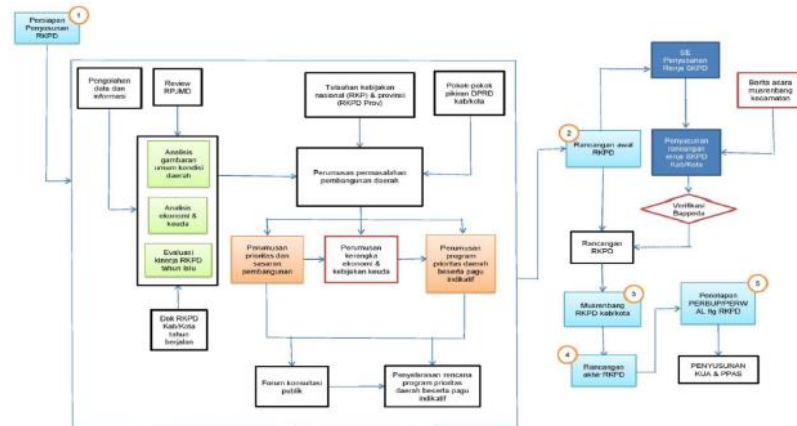
Dalam dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disampaikan oleh OPD terdapat penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan hasil evaluasi Renja-PD sampai pada Triwulan Kedua tahun 2024. Penyesuaian yang dilakukan terkait penyesuaian target capaian dan pagu yang dibutuhkan dalam pencapaian target tersebut. Hasil evaluasi Renja-PD sampai pada Triwulan Kedua tahun 2024 dapat dilihat lebih detail pada Bab II dan penyesuaian prioritas pembangunan daerah pada Bab IV.



2. Perubahan pada kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
Kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang mengalami perubahan sampai pada Triwulan Kedua tahun 2023 tentu saja akan mempengaruhi target capaian pembangunan daerah khususnya pada indikator-indikator makro yang berdampak langsung yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat/angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, gini rasio dan PDRB maupun indikator lain yang berdampak tidak langsung terkait perkonomian. Penjabaran kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah ini lebih detail dibahas dalam Bab III.
3. Perubahan rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
Dalam dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disampaikan oleh OPD terdapat penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan hasil evaluasi Renja-PD sampai pada Triwulan Kedua tahun 2024. Penyesuaian yang dilakukan terkait penyesuaian target capaian dan pagu yang dibutuhkan dalam pencapaian target tersebut. Hasil evaluasi Renja-PD sampai pada Triwulan Kedua tahun 2024 dapat dilihat lebih detail pada Bab III.
4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
Saldo anggaran lebih tahun anggaran (Silpa) sebelumnya yang belum digunakan pada saat penjabaran dan pelaksanaan APBD tahun 2024 akan menjadi perhitungan yang digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi terkait pendapatan, pengeluaran/belanja dan pembiayaan yang mendorong perubahan dalam penganggaran daerah, untuk merumuskan pendanaan program dan kegiatan pada saat perubahan APBD yang didasari oleh perubahan RKPD. Hal ini dijabarkan pada Bab III pada Sub Bab Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Dengan demikian, perencanaan Tahun 2024 yang dirumuskan berpijak pada kondisi riil yang ada dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan dan menjawab tantangan dengan menggunakan kekuatan dan peluang yang ada.

Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD dijadikan dasar bagi penyusunan Perubahan RKPD. Selanjutnya, Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi dasar penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun 2024.



Gambar 1. 1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPDP

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan RKPDP Kabupaten Landak berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 772);
21. Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Landak Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 6);



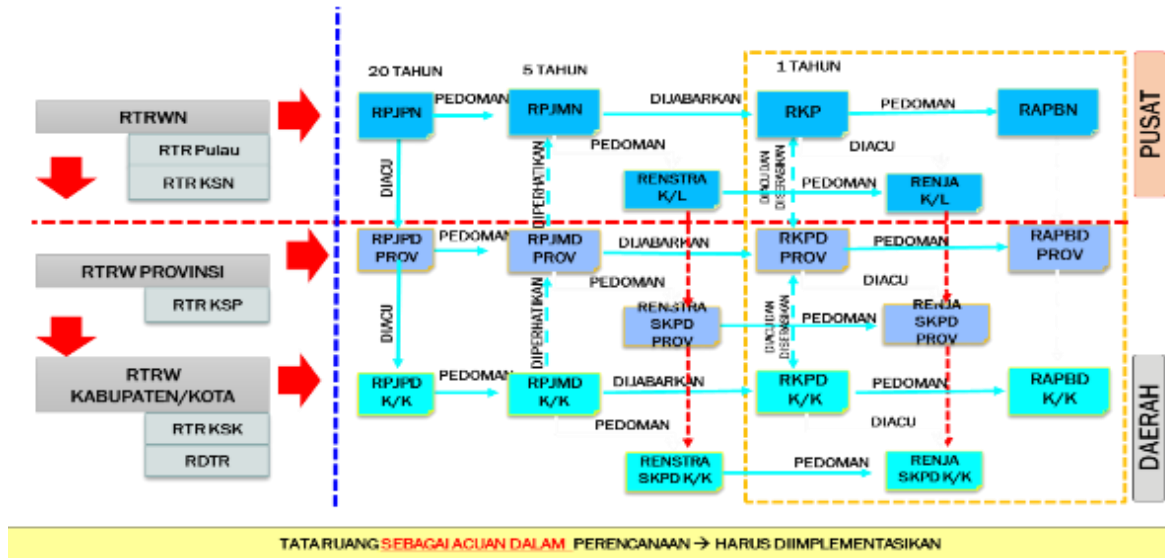
23. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Landak Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 78).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, RKPD disusun berpedoman pada RPJMD/RPD, RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini RKPD Kabupaten Landak Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada RPJMD/RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026, Pencapaian RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2023. Mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional tahun 2024 dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024. Lebih lanjut, pada Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yaitu penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.

Dokumen RKPD memiliki nilai strategis sebab menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak. Selanjutnya, RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran keterhubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar dibawah ini.



Sumber : Diolah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Gambar 1. 2 Keterhubungan RKP D dengan Dokumen Perencanaan

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Landak pada tahun 2024, guna mewujudkan sasaran-sasaran RPD 2023-2026.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Landak Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menentukan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 yang akan dibiayai dari Perubahan APBD Kabupaten Landak.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Landak Tahun 2024.
3. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang juga meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.



1.5. **Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Perubahan RKPD Kabupaten Landak Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran umum tentang penyusunan Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen Perubahan RKPD, serta maksud dan tujuan.

Bab II Hasil Evaluasi Triwulan II (Triwulan Kedua) Tahun 2024

Bab ini memuat penjelasan tentang hasil evaluasi Tahunan RKPD Tahun 2023 sampai pada Triwulan II (Triwulan Kedua) Tahun 2024 terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan pada seluruh perangkat daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun berjalan sampai dengan triwulan II, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan, serta kaitannya dengan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai Triwulan II (Triwulan Kedua) Tahun 2024 dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD/RPD, dan identifikasi isu strategis pembangunan daerah tahun berjalan.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disertai dengan target capaian kinerja dan pagu anggaran Tahun 2024 serta perencanaan prakiraan maju Tahun 2025.



Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menyajikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Landak dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD/RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026.

Bab VII Penutup

Bab ini memuat hal-hal yang dipandang penting dan perlu dilakukan untuk terlaksananya perencanaan pembangunan Tahun 2024.



BAB II

HASIL EVALUASI TRIWULAN II (TRIWULAN KEDUA) TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan

akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Landak pada aspek perencanaan antara lain didasarkan pada Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Landak Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023. Selanjutnya untuk pencapaian sampai Triwulan Kedua Tahun 2022, diuraikan berdasarkan masing – masing urusan dalam Tabel 2.1 berikut.



Tabel 2. 1 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Landak Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target RPD Kabupaten Landak pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Landak sampai dengan RKPD Kabupaten Landak Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Landak Tahun Berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Landak yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten Landak s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten Landak s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
									K	Rp	K	Rp							
1	2	3			4		4		5		6		7		8		9		10
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			
01.01.01 PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	84,7	Persen	891.561.280.000	0	217.413.784.614		262.149.438.007				112.972.272.563	0	112.972.272.563	0	330.386.057.177	0,00%	37,06%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentasi meningkatnya pemerataan mutu pada jenjang PAUD,	78	Persen	441.740.186.000	0	13.119.425.173		162.644.269.249				44.466.107.713	0	44.466.107.713	0	57.585.532.886	0,00%	13,04%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



	SD/MI dan SMP/MTs																			
01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	78	Persen	649.446.000	0	0	147.908.700				0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentasi meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	78	Persen	300.000.000	0	188.922.846.812					0	0	0	188.922.846.812	0,00%	62974,28%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
01.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Presentasi meningkatnya pelayanan dalam upaya pengendalian perizinan pendidikan	78	Persen	150.000.000	0	0					0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
01.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Presentasi meningkatnya satuan pendidikan dalam menerapkan bahasa dan sastra	79	Persen	627.545.000	0	0					0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi	100	Persen	272.320.783.000	49,8533	73.850.451.153	100	129.146.412.382	17		17	40.421.601.994	34	40.421.601.994	83,8533	114.272.053.147	83,85%	41,96%	Dinas Kesehatan



DAERAH KABUPATEN/KOTA	perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset																		
01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	100	Persen	485.879.916.000	72	113.729.465.224	100	94.278.064.334			1,219.51	26.100.536.025	1,219.512	26.100.536.025	73,2195	139.830.001.249	73,22%	28,78%	Dinas Kesehatan
01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terwujudnya Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	16	Puskesmas	428.373.000	20	402.405.314	16	45.000.000				9.520.800	0	9.520.800	20	411.926.114	125,00%	96,16%	Dinas Kesehatan
01.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Teroptimasinya Upaya Pelayanan Kesehatan	100	Persen	153.020.000	0	0	100	30.422.777				7.777.400	0	7.777.400	0	7.777.400	0,00%	5,08%	Dinas Kesehatan
01.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas kesehatan Promosi kesehatan	100	Persen	918.702.000	0	621.856.530	100	658.777.694				116.573.034	0	116.573.034	0	738.429.564	0,00%	80,38%	Dinas Kesehatan
01.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana	100	Persen	100.089.894.000	35	24.431.854.060		28.453.616.720				453.592.310	0	453.592.310	35	24.885.446.370	35,00%	24,86%	Rumah Sakit Umum Daerah



	kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset																			
01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	100	Persen	120.427.107 .000	30	1.001.33 6.780		3.268.77 0.800			10.781.80 0	0	10.781.80 0	30	1.012.118 .580	30,00 %	0,84%		Rumah Sakit Umum Daerah	
01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terwujudnya Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan					100.271. 643						0			100.271.6 43	0,00%	0,00%		Rumah Sakit Umum Daerah	
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																				
01.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya	100	Persen	38.355.493. 100	95,7 326 2	9.524.83 5.007	10 0	12.658.0 31.050	18,68 4	2.365.03 2.643	23,31 7	2.951.471 .123	42,00 103	5.316.503 .766	137,7 34	14.841.33 8.773	137,7 3%	38,69%		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan



	evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset																			
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Meningkatnya Ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber daya air	45,89	Persen	12.087.845.000	41,46318	7.168.547,2	7.816.409.000	0,2006	37.583.300	0,18058	33.833.050	0,381184	71.416.350	41,8444	7.239.964.322	91,18%	59,89%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan	
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	80,49	Persen	49.864.192.800	76,50396	30.702.952.801	77,49	16.806.040.560	0,16036	34.779.200	1,75831	381.342.400	1,918671	416.121.600	78,4226	31.119.074.401	97,43%	62,41%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Persampahan	80,49	Persen	5.108.583.200	14,02373	49.871.000						0	0	14,0237	49.871.000	17,42%	0,98%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan	
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan sistem pengelolaan air limbah/sanitasi layak (%)	64,55	Persen	22.339.285.000	30,62397	19.161.077.190	60,05	12.034.604.640		0,08031	16.095.020	0,080311	16.095.020	30,7043	19.177.172.210	47,57%	85,85%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan	
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Berkurangnya genangan pada kawasan permukiman (Luas Kawasan	4	Hektar	5.770.248.000	0,067	1.416.660.584	1	1.474.695.995		13.548.900		30.717.111	0	44.266.011	0,067	1.460.926.595	1,68%	25,32%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang



N SISTEM DRAINASE	Target Yang Ditangani /HA)																		dan Perumahan
01.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	85,5	Persen	75.186.744.600	71,81809	6.701.308.150							0	0	71,8181	6.701.308.150	84,00%	8,91%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah Kecamatan yang diawasi atas perizinan bangunan gedung dan bangunan atau prasarana bangunan	20	Persen	25.940.495.700	3,411325	4.694.461.847	5	575.000.000	0,3041	34.971.900	0,16793	19.312.200	0,472036	54.284.100	3,88336	4.748.745.947	19,42%	18,31%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten	84	Persen	862.025.000	40,65433	1.881.554.320	69	2.000.000.000	0,54461	15.785.900	3,19393	92.577.610	3,738541	108.363.510	44,3929	1.989.917.830	52,85%	230,84%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan kondisi mantab	51,8825	Persen	355.276.307.700	49,15109	55.478.066.679	50,38	86.334.029.770	0,04348	74.504.493	3,52535	6.041.234.163	3,568823	6.115.738.656	52,7199	61.593.805.335	101,61%	17,34%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
01.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	100	Persen	1.229.072.300	49,81305	207.801.700	50	300.000.000	4,5218	27.130.800	5,57364	33.441.820	10,09544	60.572.620	59,9085	268.374.320	59,91%	21,84%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan



01.03.12 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelengaraa Penataan Ruang	21, 41	Persen	2.119.294.4 00	14,8 160 8	141.052. 698	15 ,6 5	1.519.99 9.310	0,194 48	18.888.7 00	1,986 86	192.973.2 23	2,181 343	211.861.9 23	16,99 74	352.914.6 21	79,39 %	16,65%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumah an
01.04.02 PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/kot a yang di Rehabilitasi dan di Relokasi	105	Unit Rumah	164.864.000	61,9 618	459.409. 151	10 0	30.467.5 79	19,11 61	5.824.20 0	29,80 14	9.079.750	48,91 741	14.903.95 0	110,8 79	474.313.1 01	105,6 0%	287,70 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumah an
01.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penyediaan Rumah layak huni yang berhasil ditangani	12	Dokum en	50.176.382. 200	99,8 425 9	195.725. 510	10 0	161.789. 515	13,27 26	21.473.7 00	40,41 05	65.379.96 0	53,68 312	86.853.66 0	153,5 26	282.579.1 70	1279, 38%	0,56%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumah an
01.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0	0		824.321.000	0,35 547 7	2.574.79 1.453	10 0	2.905.74 5.480		3.966.30 0			0	3.966.300	0,355 48	2.578.757 .753	0,00%	312,83 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumah an
01.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyediaan Perumahan layak huni	100	Persen	618.241.000	98,5 905 3	40.427.8 34	10 0	88.408.7 26		2.222.10 0	15,80 72	13.974.90 0	15,80 715	16.197.00 0	114,3 98	56.624.83 4	114,4 0%	9,16%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumah an
01.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI,	#N/A	#N/ A		206.080.000	0	0							0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang



KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			dan Perumahan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																			
02.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	83,23	Persen	427.730.800	49,939,4	51.550.679	55	30.000.000					0	0	49,939	51.550.679	60,00%	12,05%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
02.10.10 PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	Persentase Pembebasan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah untuk menunjang pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	83,23	Persen	0	0	0							0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN																			



PELAYANAN DASAR																		
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
01.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	94	Persen	31.512.589.000	0	7.845.994.200	13.087.755.706		2.995.479.184			0	2.995.479.184	0	10.841.473.384	0,00%	34,40%	Satuan Polisi Pamong Praja
01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	100	Persen	2.480.342.000	0	344.039.786	2.044.007.650		40.190.788			0	40.190.788	0	384.230.574	0,00%	15,49%	Satuan Polisi Pamong Praja
01.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan penanggulangan penyelamatan dan kebakaran	100	Persen	2.233.213.000	0	163.307.510	141.896.095		68.653.200			0	68.653.200	0	231.960.710	0,00%	10,39%	Satuan Polisi Pamong Praja



1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
01.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	94	Persen	12.122.188.000	0	3.093.920.410						0	0	0	3.093.920.410	0,00%	25,52%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Sedang	Risiko	4.751.671.000	0	651.335.210						0	0	0	651.335.210	0,00%	13,71%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Persentase pencegahan penanggulangan penyelamatan dan kebakaran	100	Persen	247.836.000	0	0						0	0	0	0	0,00%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



N NON KEBAKARAN																			
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN DIDALAM DASAR																			
01.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	82	Persen	16.434.827.000	56	3.952.067.436	100	4.872.447.256	36,71	870.733.193	71,08	1.396.299.030	107,79	2.267.032.223	163,79	6.219.099.659	199,74%	37,84%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
01.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	100	Persen	288.660.000	100	57.770.900	100	68.256.081		1.694.800	50	4.046.400	50	5.741.200	150	63.512.100	150,00%	22,00%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
01.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN	Persentase Pemulangan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	90	Persen	202.765.000	0	0		6.918.400		6.886.400			0	6.886.400	0	6.886.400	0,00%	3,40%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,



KORBAN TINDAK KEKERASAN	yang Tertangani																		Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
01.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang ditangani	100	Persen	952.489.000	63,56	211.977.615	100	145.012.500				102.146.200	0	102.146.200	63,56	314.123.815	63,56%	32,98%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
01.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemutakhiran Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	85	Persen	6.052.579.000	43,55	300.865.990	85	307.231.140		5.159.000		21.336.100	0	26.495.100	43,55	327.361.090	51,24%	5,41%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
01.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Peningkatan Penanganan Bencana	100	Persen	378.456.000	62,42	280.384.608	100	40.000.122				8.443.000	0	8.443.000	62,42	288.827.608	62,42%	76,32%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
01.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan	100	Persen	608.295.000	100	42.781.850	100	9.476.300			50		50	0	150	42.781.850	150,00%	7,03%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan



TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makan Pahlawan																		ayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										5,75	0,79	16,36	27,88	22,11	28,67					
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR					
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
02.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PUG	100	Persen	1.002.765.000	100	800.000.000		200.000.000					0	0	100	800.000.000	100,00%	79,78%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
02.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia	95	Persen	421.141.000	93	29.945.603	85	29.999.800	50	13.994.836	26,19	3.229.524	76,19	17.224.360	169,19	47.169.963	178,09%	11,20%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan	



	layanan / pendampingan perlindungan perempuan																		an, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
02.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Tingkat Kecamatan	13	Kecamatan	324.424.000	0	0						0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
02.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Ketersediaan Data Gender dan Anak	100	Persen	73.502.000	100	9.993.301	100	10.000.100	30	3.069.800	40	1.614.762	70	4.684.562	170	14.677.863	170,00%	19,97%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
02.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Persen	345.153.000	0	34.949.952	15	30.001.300	10	1.490.000	15	3.166.080	25	4.656.080	25	39.606.032	100,00%	11,47%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



02.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan/Pendampingan Perlindungan Anak	95	Persen	121.659.000	70	24.983.600	85	35.000.200		1.080.300		15.830.604	0	16.910.904	70	41.894.504	73,68%	34,44%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
02.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Program Pengendalian Penduduk	92	Persen	324.358.000	75	288.874.810	100	299.968.297	25	32.250.000	25	89.308.092	50	121.558.092	125	410.432.902	135,87%	126,54%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
02.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15,3	Persen	8.095.731.000	65	5.134.624.254	72,05	4.899.702.200	6,25	182.391.500	18,75	947.855.500	25	1.130.247.000	90	6.264.871.254	588,24%	77,38%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,



																			Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
02.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Jumlah Poktan (Kelompok Kegiatan) yang mendukung program Bangga Kencana	81	Persen	9.559.705.000	45	1.809.525.661	77	2.525.989.860	19		20	33.992.900	39	33.992.900	84	1.843.518.561	103,70%	19,28%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																			
02.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20	Unit	1.451.326.000	86,5	5.957.000	70	1.000.000				1.000.000	0	1.000.000	86,5	6.957.000	432,50%	0,48%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan dan Analisis	1	Laporan	1.851.630.000	2	150.791.739	1	1.256.290.600			1	675.772.679	1	675.772.679	3	826.564.418	300,00%	44,64%	Dinas Pertanian, Perikanan dan



KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Harga Pangan Pokok																		Ketahanan Pangan
02.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tertanganinya daerah rawan pangan	13	Kecamatan	177.805.000	0	0	13	226.179.700			13	211.459.630	13	211.459.630	13	211.459.630	100,00%	118,93%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
02.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kab/Kota	4	Dokumen	1.005.630.000	1	4.700.900	1	3.500.000				1.261.400	0	1.261.400	1	5.962.300	25,00%	0,59%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																			
02.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	99	Persen	16.121.369.000	0	3.868.522.892							0	0	0	3.868.522.892	0,00%	24,00%	Dinas Lingkungan Hidup



02.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	4	Dokum en	1.947.318.0 00	0	114.927. 196						0	0	0	114.927.1 96	0,00%	5,90%	Dinas Lingkunga n Hidup
02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Data Kualitas Lingkungan Hidup dan Konservasi Lingkungan Hidup	4	Dokum en	6.510.039.0 00	0	593.833. 337						0	0	0	593.833.3 37	0,00%	9,12%	Dinas Lingkunga n Hidup
02.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH yang tersedia	72	Persen	2.838.453.0 00	0	943.538. 091						0	0	0	943.538.0 91	0,00%	33,24%	Dinas Lingkunga n Hidup
02.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	jumlah Layanan Izin dan/atau Layanan Pemeriksaan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Persetujuan Teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	98	Izin Usaha	339.631.000	0	82.400.3 10						0	0	0	82.400.31 0	0,00%	24,26%	Dinas Lingkunga n Hidup
02.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin	80	Persen	940.442.000	0	203.407. 946						0	0	0	203.407.9 46	0,00%	21,63%	Dinas Lingkunga n Hidup



LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Lingkungan, Izn PPLH, PUULH yang Diterbitkan oleh Pemerintah																	
02.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	"Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif "	8	Lembaga	282.249.000	0	68.769.774						0	0	0	68.769.774	0,00%	24,36%	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Yang Dilaksanakan	98	Persen	570.980.000	0	46.801.240						0	0	0	46.801.240	0,00%	8,20%	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perolehan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100	Persen	220.722.000	0	53.514.900						0	0	0	53.514.900	0,00%	24,25%	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	100	Persen	220.160.000	0	11.854.494						0	0	0	11.854.494	0,00%	5,38%	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	76	Persen	20.582.729.000	0	6.580.632.126						0	0	0	6.580.632.126	0,00%	31,97%	Dinas Lingkungan Hidup



2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang dilaksanakan (%)	95	Persen	24.607.323.000	100,1984	5.797.840.428	7.066.255.083	5,17241	759.997.661	39,0599	2.260.997.821	44,23235	3.020.995.482	144,431	8.818.835.910	152,03%	35,84%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100	Persen	938.519.000	75,99961	405.956.320	193.904.900		0	115.137.722	0	115.137.722	75,9996	521.094.042	76,00%	55,52%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100	Persen	1.223.446.000	100	276.236.920	204.911.400		50	162.882.990	50	162.882.990	150	439.119.910	150,00%	35,89%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	75	Persen	412.753.000	52,94118	79.829.020	62.487.300		0	21.779.920	0	21.779.920	52,9412	101.608.940	70,59%	24,62%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



02.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	78	Persen	232.050.000	0	0		22.423.700			47,0588	3.949.380	47,05882	3.949.380	47,0588	3.949.380	60,33%	1,70%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			
02.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	95	Persen	14.571.147.000	0	3.326.595.044	80	4.331.791.212		659.527.163		1.397.375.777	0	2.056.902.940	0	5.383.497.984	0,00%	36,95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
02.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase peningkatan wilayah desa yang ditata	80	Persen	914.049.000	0	144.373.791	70	28.557.976				5.160.035	0	5.160.035	0	149.533.826	0,00%	16,36%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
02.13.03 PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat	90	Persen	4.549.235.000	0	2.150.106.416	80	1.000.000.000					0	0	0	2.150.106.416	0,00%	47,26%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat



KERJASAMA DESA	Dalam Membangun Desa																	at dan Pemerintah Des
02.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	90	Persen	15.785.018.000	0	3.365.214.629	80	3.624.313.181	595.128.425	1.005.306.796	0	1.600.435.221	0	4.965.649.850	0,00%	31,46%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Des	
02.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGAN LEMBAGAN KEMASYARAKATAN, LEMBAGAN ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	95	Persen	570.351.000	0	276.525.990	85	898.411.250	603.306.684	25.723.803	0	629.030.487	0	905.556.477	0,00%	158,77%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Des	
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		
02.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	98	Persen	19.179.263.000	0	4.836.890.615	95	5.669.396.802	596.426.696	1.732.177.475	0	2.328.604.171	0	7.165.494.786	0,00%	37,36%	Dinas Perhubungan	



02.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan yang tersedia	95	Persen	5.395.041.0 00	0	2.750.56 3.550	80	2.115.47 9.315		24.675.0 00		167.830.1 05	0	192.505.1 05	0	2.943.068 .655	0	54,55%	Dinas Perhubun gan
02.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		0		478.881.000															Dinas Perhubun gan
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN DAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
02.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	18.145.861. 000	34,7 8	4.259.81 7.604	10 0	5.125.91 3.208			22,22 22	2.336.317 .216	22,22 222	2.336.317 .216	57,00 22	6.596.134 .820	57%	36,35%	Dinas Komunika si dan Informati ka
02.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan	65	Persen	7.237.832.0 00	72,6 3	2.087.04 4.446	55	227.225. 040				21.399.71 2	0	21.399.71 2	72,63	2.108.444 .158	112%	29,13%	Dinas Komunika si dan Informati ka



02.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Layanan Aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	76	Unit	5.458.962.0 00	8	557.316. 340	66	102.909. 600				59.211.60 0	0	59.211.60 0	8	616.527.9 40	11%	11,29%	Dinas Komunika si dan Informati ka
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																			
02.20.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase tersedianya sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	85	Persen	1.658.796.0 00	33,4 4	317.877. 782	75	112.562. 400				5.536.200	0	5.536.200	33,44	323.413.9 82	39%	19,50%	Dinas Komunika si dan Informati ka
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																			
02.21.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tersedianya keamanan Informasi Pemerintah	65	Persen	1.451.426.0 00	30	181.463. 036	55	112.459. 100				33.460.49 7	0	33.460.49 7	30	214.923.5 33	46%	14,81%	Dinas Komunika si dan Informati ka



2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																			
02.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/ aset	80	Persen	14.331.376.000	0	3.571.478.817	100	5.394.306.125	10	440.252.124	40	1.814.046.259	50	2.254.298.383	50	5.825.777.200	63%	40,65%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
02.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6,5	Persen	120.000.000	0	33.783.950		15.380.000				10.267.300	0	10.267.300	0	44.051.250	0%	36,71%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
02.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN	Persentase pemeriksaan dan pengawasan	0		516.343.000	0	86.043.200		68.406.950				0	0	0	86.043.200	0%	16,66%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil	



PEMERIKSAAN KOPERASI	yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota																		Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
02.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	70	Persen	271.151.000	0	34.620.700					0	0	0	34.620.700	0%	12,77%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
02.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	25	Persen	335.675.000	0	36.796.300	112.918.000				19.618.300	0	19.618.300	0	56.414.600	0%	16,81%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
02.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase tingkat kesadaran keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan	55	Persen	550.156.000	0	569.881.510	80.070.188				0	0	0	569.881.510	0%	103,59%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
02.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN	Meningkatnya rasio pelaku usaha mikro,	0		1.094.118.000	0	140.040.350	412.623.300				163.776.868	0	163.776.868	0	303.817.218	0%	27,77%	Dinas Koperasi, Usaha	



N USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	kecil dan menengah (UMKM)																	Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
02.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya rasio pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	0		4.552.322.000	0	26.814.500					0	0	0	26.814.500	0%	0,59%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																		
02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Pencari Kerja dilatih	20	Orang	520.330.000	0	66.865.000	211.704.000	0		211.608.896	0	211.608.896	0	278.473.896	0%	53,52%		Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
02.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	80	Orang	386.187.000	0	70.565.900	84.999.400	3.587.500		33.273.900	0	36.861.400	0	107.427.300	0%	27,82%		Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu



																		Satu Pintu dan Tenaga Kerja
02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola yang Layak (memiliki PP/PKB)	7	Perusahaan	902.879.000	0	147.558.912	736.665.500	573.920.996	65.730.214	0	639.651.210	0	787.210.122	0%	87,19%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																		
02.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	15.167.105.000	0	3.779.426.699	4.998.558.885	585.545.399	1.924.707.418	0	2.510.252.817	0	6.289.679.516	0%	41,47%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
02.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM	Terlaksananya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4	Dokumen	856.937.000	0	0				0	0	0	0	0%	0,00%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan		



PENANAMAN MODAL																		Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
02.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	804.063.000	0	106.076.546	104.402.800	5.061.700	50.693.900	0	55.755.600	0	161.832.146	0%	20,13%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
02.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Pelayanan Perizinan dan non perizinan berusaha dan non Berusaha	7693	Izin	2.434.513.000	0	301.687.191	208.769.616	10.695.171	67.090.945	0	77.786.116	0	379.473.307	0%	15,59%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
02.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	138	Kegiatan Usaha	2.734.375.000	0	642.386.727	380.144.890	7.673.600	56.786.408	0	64.460.008	0	706.846.735	0%	25,85%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
02.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	40	Dokumen	622.903.000	0	112.002.854	82.397.500	1.859.800	52.422.710	0	54.282.510	0	166.285.364	0%	26,70%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		



	Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan																	
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
02.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	15.196.084.000	47,9955	3.577.961.047	4.032.521.423	429.528.619	1.410.715.233	0	1.840.243.852	47,9996	5.418.204.899	48%	35,66%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	34,56	Persen	802.252.000	1,01827	49.757.758	99.443.704	0	16.994.800	0	16.994.800	1,01823	66.752.558	3%	8,32%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Persentase prestasi olahraga ditingkat provinsi	25	Persen	4.932.990.000	57	5.342.548.468	2.386.248.200	0	1.183.237.320	0	1.183.237.320	57	6.525.785.788	228%	132,29%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	



02.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pembinaan Pramuka	0	Pembinaan	988.700.000	50	300.000.000						0	0	50	300.000.000	0%	30,34%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																		
02.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0	0		775.791.000	0	108.451.424	100.907.937	0		0		0	0	0	108.451.424	0%	13,98%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
02.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Kuno Yang Dilestarikan	24	Eksemplar	150.853.000	0	9.144.000	12.290.865	0		2.513.407		2.513.407	0	0	11.657.407	0%	7,73%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																		
02.24.01 PROGRAM PENUNJANG	Persentase Unit Kerja yang Memperoleh	78	Persen	14.208.142.000	0	2.660.754.358	3.534.403.191	409.505.854		1.071.472.766		1.480.978.620	0	0	4.141.732.978	0%	29,15%	Dinas Kearsipan dan



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Kera, Meningkatnya Evaluasi Kinerja dan Laporan Keuangan / Aset																	Perpustakaan
02.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	90	Persen	584.475.000	0	191.419.423	100.249.191	6.875.600	37.927.545	44.803.145	0	236.222.568	0%	40,42%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
02.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Keberadaan dan Keutuhan Arsip	95	Persen	255.929.000	0	15.043.100	7.967.200	0	0	0	0	15.043.100	0%	5,88%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
02.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	7	Persen	129.303.000	0	689.600	7.942.900	0	0	0	0	689.600	0%	0,53%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																		
02.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah objek pemajuan kebudayaan	78	Persen	2.712.637.000	0	2.293.508.935	2.588.167.100	0	1.193.647.517	0	1.193.647.517	0	3.487.156.452	0,00%	128,55%	Dinas Pendidikan dan		



	yang dikembangkan																			Kebudayaan
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase jumlah kesenian tradisional yang dikembangkan	78	Persen	455.581.000	0	31.785.202					0	0	0	31.785.202	0,00%	6,98%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase jumlah pembinaan sejarah yang dilaksanakan	78	Persen	828.023.000	0	293.264.547	73.264.800				0	0	0	293.264.547	0,00%	35,42%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase jumlah cagar budaya dilestarikan dan dikelola	78	Persen	990.430.000	0	187.200.000	6.000.000.000			2.026.677.184	0	2.026.677.184	0	2.213.877.184	0,00%	223,53%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase jumlah museum yang dikelola	0	Persen	0															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										9,48	8,23	21,78	31,49	31,26	39,72					
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR					
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	32	Ton	402.252.000	29	4.800.000	29	677.500.000				0	0	29	4.800.000	90,63%	1,19%		Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan



03.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	914	Ton	2.866.017.0 00	100 00	498.588. 635	89 99	2.210.13 2.400			5000	867.297.3 43	5000	867.297.3 43	1500 0	1.365.885 .978	1641, 14%	47,66%	Dinas Pertanian , Perikanan dan Ketahana n Pangan
03.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Dokumen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	8	Dokum en	461.078.000	0	0						0	0	0	0		0,00%	0,00%	Dinas Pertanian , Perikanan dan Ketahana n Pangan
03.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Jenis Olahan Perikanan	7	Jenis	398.414.000	7	5.899.40 0	7	132.060. 000			4	131.941.9 90	4	131.941.9 90	11	137.841.3 90	157,1 4%	34,60%	Dinas Pertanian , Perikanan dan Ketahana n Pangan
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																			
03.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	85	Persen	83.339.031. 000	85	21.951.2 07.605	85	25.602.8 77.560		2.787.53 6.148		9.909.883 .220	0	12.697.41 9.368	85	34.648.62 6.973	100,0 0%	41,58%	Dinas Pertanian , Perikanan dan Ketahana n Pangan
03.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Jumlah Pengadaan Alsintan	209 5	Unit	4.890.749.0 00	332	2.009.62 7.526	52 0	2.445.92 3.333				810.888.0 00	0	810.888.0 00	332	2.820.515 .526	15,85 %	57,67%	Dinas Pertanian , Perikanan



PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																			dan Ketahanan Pangan
03.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1078	Unit	50.845.578.000	266	19.945.571.589	137	12.946.191.665			1.496.878.985	0	1.496.878.985	266	21.442.450.573	24,68%	42,17%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	
03.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah penyakit ternak yang dicegah dan ditanggulangi	5	Jenis	1.546.798.000	15	393.022.465	5	2.631.535.000			272.825.500	0	272.825.500	15	665.847.965	300,00%	43,05%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	
03.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya OPT dan tertanggulangnya bencana	13	Kecamatan	574.080.000	13	1.020.866.930	13	1.926.937.300			1.377.478.400	0	1.377.478.400	13	2.398.345.330	100,00%	417,77%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	
03.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi standarisasi mutu dan hasil pertanian dan pendataan poktan pengolah TPH	4	Laporan	77.839.000	1	16.170.898	1	3.947.700			0	0	1	16.170.898	25,00%	20,77%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan		
03.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	156	WKPP	5.110.324.000	156	899.106.305	156	1.448.173.500			533.603.409	0	533.603.409	156	1.432.709.714	100,00%	28,04%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			



3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
03.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan berusaha	90	Persen	211.279.000	0	33.375.730	31.728.930				0	0	0	33.375.730	0%	15,80%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
03.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase sarana dan prasarana perdagangan dikelola dengan baik	90	Persen	1.786.205.000	0	113.301.207	93.731.441				0	0	0	113.301.207	0%	6,34%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
03.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok barang penting	90	Persen	1.382.188.000	0	1.295.962.977	2.066.034.417			1.988.299.600	0	1.988.299.600	0	3.284.262.577	0%	237,61%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
03.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	persentase jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	90	Persen	206.080.000	0	0					0	0	0	0	0%	0,00%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



03.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	90	Persen	949.266.000	0	154.104. 720	126.612. 316					0	0	0	154.104.7 20	0%	16,23%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menenga h, Perindust rian dan Perdagan gan
03.30.07 PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail,marketpl ace,perhotelan dan jasa akomodasi	90	Persen	206.080.000	0	0						0	0	0	0	0%	0,00%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menenga h, Perindust rian dan Perdagan gan
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																		
03.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tersusunnya laporan rencana pembangunan industri	4	Dokumen	1.929.930.0 00	0	129.713. 507	324.690. 128					0	0	0	129.713.5 07	0%	6,72%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menenga h, Perindust rian dan Perdagan gan
03.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN	Jumlah laporan pengendalian izin usaha	4	Dokumen	123.648.000	0	29.976.9 85	16.441.1 37			16.406.33 7	0	16.406.33 7	0	46.383.32 2	0%	37,51%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil	



IZIN USAHA INDUSTRI	industri yang diterbitkan																	Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
03.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0	0		336.856.000	0	39.973.216	22.949.872			5.548.300	0	5.548.300	0	45.521.516	0%	13,51%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																		
03.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	388.517.000	0	21.804.294					0	0	0	21.804.294	0%	5,61%	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																		
03.26.02 PROGRAM PENINGKATAN	Jumlah Destinasi	16	Lokasi	3.435.116.000	1	75.262.390	64.314.200			30.971.820	0	30.971.820	1	106.234.210	6%	3,09%	Dinas Pemuda, Olah Raga	



DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Wisata yang dikembangkan																	dan Pariwisata
03.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi Pariwisata	4	Kegiatan	415.988.000	1	173.944.565		47.212.000			47.177.718	0	47.177.718	1	221.122.283	25%	53,16%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
03.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual	15	Pelaku Ekraf	230.161.000	0	0		52.787.676			45.096.495	0	45.096.495	0	45.096.495	0%	19,59%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
03.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	"Jumlah Sumber Daya Pariwisata Ekonomi Kreatif	4	Orang	816.005.000	0	0					0	0	0	0	0	0%	0,00%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																		
03.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya	85	Persen	13.851.235.000,00	0	2.685.998.623					0	0	0	2.685.998.623	0,00%	19,39%	Dinas Perkebunan	



	evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset																	
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Pengadaan Alsintan		4.216.434.000,00	0	0					0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Perkebunan		
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		1.365.773.000,00	0	780.397.312					0	0	0	780.397.312	0,00%	57,14%	Dinas Perkebunan	
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya OPT dan tertanggulangnya bencana		780.965.000,00	0	0					0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Perkebunan	
03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi standarisasi mutu dan hasil pertanian dan pendataan poktan pengolah TPH		423.311.000,00	0	0					0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Perkebunan	
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian		439.758.000,00	0	0					0	0	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Perkebunan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										0,00	5,27	50,28	33,16	50,28	38,44			
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR			
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN																		



PEMERINTAHAN																			
4.01																			
SEKRETARIAT DAERAH																			
04.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran - Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota di Bidang Organisasi	100	Persen	78.385.701.210	100	25.119.070.629	100	25.376.073.573	16,67	1.770.861.615	21	8.480.483.515	37,67	10.251.345.130	137,67	35.370.415.759	138%	45,12%	Sekretariat Daerah
04.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu Persentase kerjasama yang aktif Persentase Ketersediaan Dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota di SKPD Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,25	Persen	97.389.603.180	95	14.387.835.704	97,25	13.697.852.484	25	157.258.600	10,71	7.872.614.613	35,71	8.029.873.213	130,71	22.417.708.917	136%	23,02%	Sekretariat Daerah



	Kabupaten/Kota di Bidang Organisasi Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat Persentase Raperda yang Diundangkan Menjadi Peraturan Daerah																		
04.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan	100	Persen	10.245.042.010	91,6	1.403.880.577	78	1.642.923.146	6,56	78.829.370	7,25	314.685.655	13,81	393.515.025	105,41	1.797.395.602	105%	17,54%	Sekretariat Daerah
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4.02 SEKRETARIAT DPRD																			
04.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	95	Persen	117.173.982.000	84,83	32.000.873.992	95	32.084.435.268	17,92	5.748.063.011	28	8.983.532.963	45,92	14.731.595.974	130,75	46.732.469.966	138%	39,88%	Sekretariat DPRD
04.02.02 PROGRAM	PERSENTASE DUKUNGAN	95	Persen	33.373.674.000	96,14	12.572.158.951	95	10.294.010.554	10,51	1.081.749.383	51,18	5.268.863.142	61,69	6.350.612.525	157,83	18.922.771.476	166%	56,70%	Sekretariat DPRD



DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										16,48	10,63	25,39	37,21	41,87	47,84				
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR				
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5.01 PERENCANAAN																			
05.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran dan meningkatnya Evaluasi kinerja	90	Persen	18.619.497.000	85	4.126.713.557	85	4.651.776.838	30,36	963.758.532		1.573.507.589	30,36	2.537.266.121	115,36	6.663.979.678	128%	35,79%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen bahan perumusan dan pengambilan kebijakan berupa hasil koordinasi, informasi, pedoman, pustaka, dan arsip tersedia tepat waktu	100	Persen	8.004.025.000	100,48	1.036.207.853	86	947.101.302	20,17	150.126.213		281.656.769	20,17	431.782.982	120,65	1.467.990.835	121%	18,34%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
05.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pembangunan Infrastruktur dan kewilayahan yang terlaksana	75	Persen	8.799.811.000	79	755.260.816	75	1.259.119.955	24,19	94.396.556		154.112.362	24,19	248.508.918	103,19	1.003.769.734	138%	11,41%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																			
05.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang diterapkan	15	Persen	4.540.653.000	12	286.895.807	12	799.784.859	3	30.993.174		39.978.522	3	70.971.696	15	357.867.503	100%	7,88%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5.02 KEUANGAN																			
05.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	166.871.733.000	100	6.352.302.459	10	48.464.852.931	25	1.144.345.498	25	2.390.771.673	50	3.535.117.171	150	9.887.419.630	150%	5,93%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
05.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Anggaran Yang Disusun Tepat Waktu	100	Persen	1.036.703.799.300	100	239.160.386.280	10	244.591.651.143	3,3	11.613.139.231	15	40.153.943.974	18,3	51.767.083.205	118,3	290.927.469.485	118%	28,06%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
05.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Perangkat Daerah yang	100	Persen	6.853.570.000	100	667.372.315	10	1.267.707.708	2	23.450.650	17	213.476.047	19	236.926.697	119	904.299.012	119%	13,19%	Badan Pengelolaan



BARANG MILIK DAERAH	Tertib Administrasi dalam Pengelolaan BMD Sesuai Regulasi																		Keuangan dan Aset Daerah
05.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset		Persen	22.915.686.000	77,59	4.755.994.457	100	6.998.390.785	21	344.577.909	17,63	1.730.506.880	38,63	2.075.084.789	116,22	6.831.079.246	0%	29,81%	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
05.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerimaan pajak daerah	100	Persen	6.819.912.000	52,8	728.974.968	100	1.493.624.196	7,09	0	10,98	190.568.245	18,07	190.568.245	70,87	919.543.213	71%	13,48%	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5.03 KEPEGAWAIAN																			
05.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	88	Persen	15.862.186.000	59,41	4.982.702.484						0	0	59,41	4.982.702.484	68%	31,41%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	



05.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Disiplin ASN	0,3 6	Persen	2.239.937.7 36	0,09	146.180. 559						0	0	0,09	146.180.5 59	25%	6,53%	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
	Persentase Kinerja ASN	83	Persen	951.013.984	68,8 9	118.907. 700						0	0	68,89	118.907.7 00	83%	12,50%	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
	Persentase pemenuhan regulasi manajemen ASN	100	Persen	60.000.000	9,09	0						0	0	9,09	0	9%	0,00%	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
	Tingkat Kualitas pengadaan dan kesesuaian penempatan ASN dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang pendidikan	95, 1	Persen	4.864.743.6 40	129, 67	683.634. 267						0	0	129,6 7	683.634.2 67	136%	14,05%	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
	Tingkat Kualitas Perencanaan dan Pengembang an Karir ASN	100	Persen	1.807.139.6 40	44,2 8	147.739. 900						0	0	44,28	147.739.9 00	44%	8,18%	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN																		



PEMERINTAHAN																			
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																			
05.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pemenuhan regulasi pengembangan kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	100	Persen	170.000.000	0	0							0	0	0	0	0%	0,00%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man
	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	6,04	Persen	9.995.547.213	3,2	2.646.849.412							0	0	3,2	2.646.849.412	53%	26,48%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										17,96	4,63	11,29	15,05	29,25	19,68				
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR				
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																			
6.01 INSPEKTORAT DAERAH																			
06.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			31.615.326.000	0	11.250.729.575	0	8.201.758.170	0	707.646.447	0	2.577.024.130	0	3.284.670.577	0	14.535.400.152	0%	45,98%	Inspektorat
06.01.02 PROGRAM PENYELENGGAAN PENGAWASAN	Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan	100	Persen	9.198.346.000	0	2.029.457.980	0	2.108.109.594	0	0	0	323.472.365	0	323.472.365	0	2.352.930.345	0%	25,58%	Inspektorat



	dan penganggaran yang ditindaklanjuti																		
06.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase tingkat capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) Kabupaten	90	Persen	3.506.600.000	0	503.635.928	0	1.095.209.704	0	0	0	65.106.700	0	65.106.700	0	568.742.628	0%	16,22%	Inspektoral
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										0,00	6,20	0,00	26,00	0,00	32,21				
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR				
7 UNSUR KEWILAYAHAN																			
7.01 KECAMATAN																			
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	9.019.616.000	0	1.573.853.467						0	0	0	1.573.853.467	0%	17,45%	Kecamatan Ngabang	
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	557.149.000	0	22.288.310						0	0	0	22.288.310	0%	4,00%	Kecamatan Ngabang	



07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	582.940.000	0	23.616.000						0	0	0	23.616.000	0%	4,05%	Kecamatan Ngabang
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	464.100.000	0	0						0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Ngabang
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa Berkarakter Pancasila di Wilayah Kecamatan	76	Desa	464.100.000	0	0						0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Ngabang
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkarakter Pancasila di Wilayah Kecamatan	100	Persen	650.791.000	0	24.230.400						0	0	0	24.230.400	0%	3,72%	Kecamatan Ngabang
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Desa Berkarakter Pancasila di Wilayah Kecamatan	100	Persen	10.173.396.000	0	1.158.885.422	2.877.177.184				659.347.075	0	659.347.075	0	1.818.232.497	0%	17,87%	Kecamatan Air Besar
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN	Persentase Desa Berkarakter Pancasila di	100	Persen	464.100.000	0	0	18.150.000				17.661.800	0	17.661.800	0	17.661.800	0%	3,81%	Kecamatan Air Besar



DAN PELAYANAN PUBLIK	Wilayah Kecamatan																	
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	576.401.000	0	13.838.880	84.508.768			7.161.000	0	7.161.000	0	20.999.880	0%	3,64%	Kecamatan Air Besar	
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	0	0					0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Air Besar	
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	16	Desa	464.100.000	0	0					0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Air Besar	
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	899.202.000	0	26.962.864	87.755.272				0	0	0	26.962.864	0%	3,00%	Kecamatan Air Besar	
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	8.628.064.000	0	1.675.393.680	2.112.777.520	0		795.421.040	0	795.421.040	0	2.470.814.720	0%	28,64%	Kecamatan Kuala Behe	
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	431.000.000	0	16.041.520					0	0	0	16.041.520	0%	3,72%	Kecamatan Kuala Behe	



07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	502.373.000	0	23.463.000	37.613.000	0	10.106.000	0	10.106.000	0	33.569.000	0%	6,68%	Kecamatan Kuala Behe
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	431.000.000	0	0				0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Kuala Behe
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	11	Desa	431.000.000	0	9.337.900				0	0	0	9.337.900	0%	2,17%	Kecamatan Kuala Behe
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	674.078.000	0	28.415.000	32.019.400			0	0	0	28.415.000	0%	4,22%	Kecamatan Kuala Behe
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	11.322.480.000	0	1.531.441.898				0	0	0	1.531.441.898	0%	13,53%	Kecamatan Sengah Temila
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	581.964.000	0	29.775.580				0	0	0	29.775.580	0%	5,12%	Kecamatan Sengah Temila
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA	Persentase Kinerja Pemberdayaan	95	Persen	563.062.000	0	222.366.500				0	0	0	222.366.500	0%	39,49%	Kecamatan Sengah Temila



N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan																		
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	0	13.132.000					0	0	0	13.132.000	0%	2,83%			Kecamatan Temila
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	14	Desa	464.100.000	0	5.081.200					0	0	0	5.081.200	0%	1,09%			Kecamatan Sengah Temila
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	599.462.000	0	47.880.048					0	0	0	47.880.048	0%	7,99%			Kecamatan Sengah Temila
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	10.933.492.000	0	1.837.974.471					0	0	0	1.837.974.471	0%	16,81%			Kecamatan Menyuke
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	0	1.820.000					0	0	0	1.820.000	0%	0,39%			Kecamatan Menyuke
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	600.545.000	0	20.340.000					0	0	0	20.340.000	0%	3,39%			Kecamatan Menyuke



07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	0	5.460.00 0						0	0	0	5.460.000	0%	1,18%	Kecamata n Menyuke
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	16	Desa	464.100.000	0	1.820.00 0						0	0	0	1.820.000	0%	0,39%	Kecamata n Menyuke
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	604.162.000	0	40.400.0 00						0	0	0	40.400.00 0	0%	6,69%	Kecamata n Menyuke
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	6.507.208.0 00	0	580.760. 746						0	0	0	580.760.7 46	0%	8,92%	Kecamata n Meranti
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	0	0						0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamata n Meranti
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	528.887.000	0	3.800.00 0						0	0	0	3.800.000	0%	0,72%	Kecamata n Meranti
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI	Persentase Kinerja Pemberdayaan	100	Persen	464.100.000	0	0						0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamata n Meranti



KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan																	
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	6	Desa	464.100.000	0	5.000.000					0	0	0	5.000.000	0%	1,08%	Kecamatan Meranti	
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	567.458.000	0	5.000.000					0	0	0	5.000.000	0%	0,88%	Kecamatan Meranti	
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	8.798.036.000	0	884.106.369					0	0	0	884.106.369	0%	10,05%	Kecamatan Menjalin	
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	516.415.000	0	0					0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Menjalin	
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	487.296.000	0	0					0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Menjalin	
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	0	0					0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Menjalin	



KETERTIBAN UMUM																		
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	8	Desa	464.100.000	0	0						0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamata n Menjalin
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	603.327.000	0	0						0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamata n Menjalin
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	10.410.176. 000	58,6 8	1.303.44 2.790						0	0	58,68	1.303.442 .790	59%	12,52%	Kecamata n Mandor
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	0	0						0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamata n Mandor
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	514.673.000	75	17.060.0 00						0	0	75	17.060.00 0	79%	3,31%	Kecamata n Mandor
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	0	0						0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamata n Mandor



07.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	17	Desa	464.100.000	0	0						0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamata n Mandor
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	637.366.000	70,5 882 4	8.126.00 0						0	0	70,58 82	8.126.000	71%	1,27%	Kecamata n Mandor
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	11.050.052. 000	0	1.943.10 5.873						0	0	0	1.943.105 .873	0%	17,58%	Kecamata n Mempaw ah Hulu
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	559.081.000	0	14.742.0 00						0	0	0	14.742.00 0	0%	2,64%	Kecamata n Mempaw ah Hulu
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	555.563.000	0	10.240.0 00						0	0	0	10.240.00 0	0%	1,84%	Kecamata n Mempaw ah Hulu
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	0	24.171.6 00						0	0	0	24.171.60 0	0%	5,21%	Kecamata n Mempaw ah Hulu
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR	Persentase Kinerja Pemberdayaan	17	Desa	464.100.000	0	0						0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamata n



AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan																		Mempawah Hulu
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	553.856.000	0	15.032.580						0	0	0	15.032.580	0%	2,71%		Kecamatan Mempawah Hulu
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	6.831.076.000	60,16	1.910.094.607	100	1.552.727.000			35	543.584.039	35	543.584.039	95,16	2.453.678.646	95%	35,92%	Kecamatan Sebangki
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	595.457.000	0	5.794.920		12.831.700				0	0	0	5.794.920	0%	0,97%		Kecamatan Sebangki
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	464.100.000	0	11.101.740		7.182.600				0	0	0	11.101.740	0%	2,39%		Kecamatan Sebangki
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	0	6.155.000		9.774.600				0	0	0	6.155.000	0%	1,33%		Kecamatan Sebangki
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	5	Desa	464.100.000	0	3.619.000		6.170.800				0	0	0	3.619.000	0%	0,78%		Kecamatan Sebangki



07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	552.223.000	0	14.021.600		25.886.700					0	0	0	14.021.600	0%	2,54%	Kecamatan Sebangki
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	8.978.492.000	53,58	1.876.360.355							0	0	53,58	1.876.360.355	54%	20,90%	Kecamatan Jelimpo
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	556.050.000	32	49.740.480							0	0	32	49.740.480	32%	8,95%	Kecamatan Jelimpo
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	496.587.000	0	0							0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Jelimpo
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	0	0							0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Jelimpo
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	13	Desa	464.100.000	0	0							0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Jelimpo
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan	100	Persen	694.970.000	15	29.976.780							0	0	15	29.976.780	15%	4,31%	Kecamatan Jelimpo



DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan																	
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	8.252.540.000	95,11	1.630.046.780						0	0	95,11	1.630.046.780	95%	19,75%	Kecamatan Banyuke Hulu
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	100	Persen	556.894.000	100	32.261.150						0	0	100	32.261.150	100%	5,79%	Kecamatan Banyuke Hulu
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	464.100.000	0	0						0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Banyuke Hulu
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa Berkarakter Pancasila di Wilayah Kecamatan	100	Persen	464.100.000	100	18.091.450						0	0	100	18.091.450	100%	3,90%	Kecamatan Banyuke Hulu
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa Berkarakter Pancasila di Wilayah Kecamatan	7	Desa	464.100.000	100	7.916.400						0	0	100	7.916.400	1429%	1,71%	Kecamatan Banyuke Hulu
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran,	100	Persen	637.104.000	101	20.380.500						0	0	101	20.380.500	101%	3,20%	Kecamatan Banyuke Hulu



PEMERINTAHAN DESA	sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset																	
07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100	Persen	7.889.060.000	0	1.204.228.547					0	0	0	1.204.228.547	0%	15,26%	Kecamatan Sompak	
07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Pelayanan Publik	100	Persen	464.100.000	0	0					0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Sompak	
07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan	95	Persen	637.313.000	0	34.007.400					0	0	0	34.007.400	0%	5,34%	Kecamatan Sompak	
07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Siskamling Aktif	100	Persen	464.100.000	0	0					0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Sompak	
07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Jumlah Desa Berkarakter Pancasila di	7	Desa	464.100.000	0	0					0	0	0	0	0%	0,00%	Kecamatan Sompak	



PEMERINTAHAN UMUM	Wilayah Kecamatan																		
07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Laporan Keuangan tepat waktu dan akuntabel, Persentase Desa yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Partisipatif, Persentase Desa yang menjalankan tertib Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	Persen	638.538.000	0	12.855.000						0	0	0	12.855.000	0%	2,01%	Kecamatan Sompak	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										0,00	0,00	35,00	29,62	35,00	29,62				
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	SR				
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																			
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																			
08.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja	100	Persen	9.327.040.000	97,33	2.218.119.748	98	2.405.943.130			98	1.304.986.192	98	1.304.986.192	195,33	3.523.105.940	195%	37,77%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



	dan laporan keuangan/aset																			
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Desa Berkarakter Pancasila	46	Desa	922.188.000	10	140.253.200	11	870.474.600			274.160.131	0	274.160.131	10	414.413.331	22%	44,94%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan Kriteria yang berlaku	100	Persen	11.477.848.000	100	19.315.874.688	100	31.759.095.402			100	27.118.497.402	100	27.118.497.402	200	46.434.372.090	200%	404,56%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas dan LSM yang aktif	97,4	Persen	553.808.000	60	52.466.805	97	112.129.546				0	0	60	52.466.805	62%	9,47%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya	100	Persen	55.525.588.000	100	52.481.300	100	240.740.000				236.674.600	0	236.674.600	100	289.155.900	100%	0,52%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN	Persentase realisasi kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD)	100	Persen	535.976.000	100	68.979.250	100	93.050.077				36.050.200	0	36.050.200	100	105.029.450	100%	19,60%	Badan Kesatuan Bangsa



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2024 pada dasarnya menjelaskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2024, lebih memperhatikan perkiraan sumber-sumber pendapatan, besaran pendapatan dari sektor sektor potensial, kondisi perekonomian global dan regional yang ditunjukkan untuk mengalokasikan dengan suatu pendekatan *money follow program* yang pada akhirnya dapat tercapai suatu anggaran yang efektif dan efisien.

Dampak akibat terjadinya Pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 dampaknya masih dirasakan sampai saat ini sangat mempengaruhi ekonomi daerah dimana pendapatan daerah terkena dampak akibat perekonomian yang melambat baik lokal, regional, nasional dan internasional, walaupun pada tahun 2022 sudah terjadi kebangkitan ekonomi (*rebound*) yang ditunjukkan dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Landak pada angka 4,89%. Untuk tahun 2024 masih akan melihat perkembangan lebih lanjut sampai semester pertama tahun 2023 untuk menentukan pengaruhnya pada proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah dari arahan pemerintah pusat.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah membahas mengenai tantangan perekonomian Kabupaten Landak serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 dan diupayakan tetap sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional tahun 2024.

3.1. 1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Landak

Pertumbuhan ekonomi, indikator yang umum dipakai untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi makro suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Landak dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



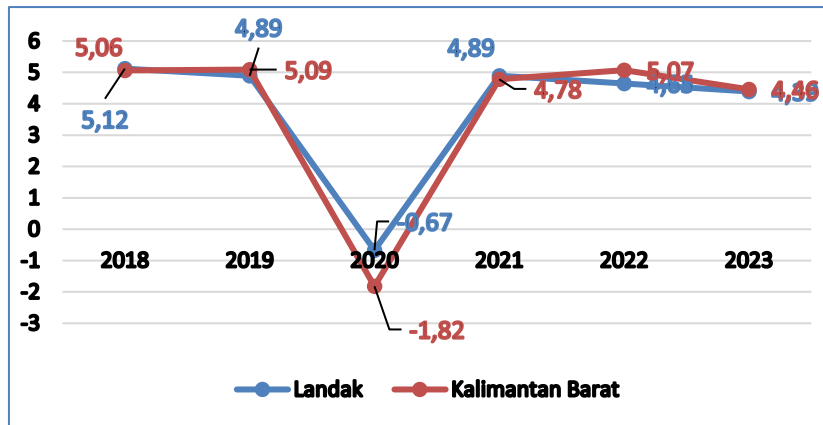
yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat.

Naik turunnya PDRB biasa juga disebut pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan PDRB, maka makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan naik atau turunnya produk yang dihasilkan, sebagai balas jasa seluruh kegiatan ekonomi. Naik turunnya angka PDRB bisa juga disebut laju pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2023 PDRB Kabupaten Landak atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 12.775,76 miliar di tahun 2022 menjadi Rp. 13.684,30 miliar di tahun 2023. Sementara, PDRB atas dasar harga konstan (2010=100) meningkat dari Rp. 7.652,66 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp. 7.988,20 miliar pada tahun 2023, sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 adalah 4,39%.

PDRB Kalbar atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai 274 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar pada sektor pertanian (20,08%), sektor industri pengolahan (15,65%), dan sektor perdagangan (14,385%). Struktur ekonomi ini masih menempatkan sektor pertanian sebagai leading sector. Namun, jika dilihat dari strukturnya selama lima tahun terakhir tampaknya terjadi pergeseran sektoral, dimana sedikit demi sedikit sektor pertanian tergeser oleh industri pengolahan dan perdagangan.

Ekonomi Kalimantan Barat mengalami perlambatan dimana tahun 2023 turun sebesar 4,46 persen yang sebelumnya tahun 2022 yaitu 5,07 persen, penurunan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat ini dikarenakan ada beberapa faktor baik itu dari adanya El Nino yang berdampak pada sektor pertanian khususnya pangan, juga karena terkontraksinya pertumbuhan sektor pertambangan sebesar -15,81 persen dan pada sisi PDRB pengeluaran dimana ekspor barang dan jasa Kalimantan Barat berkontraksi sebesar 23,93 persen dengan adanya kebijakan hilirisasi atau pelarangan ekspor barang mentah khususnya bauksi, dan yang terakhir juga karena masih belum stabilnya kondisi Geopolitik dunia.



Gambar 3. 1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Landak

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka 2019-2024 dan Kalimantan Barat

Dalam Angka 2019-2024, BPS

Struktur Perekonomian, Pada tahun 2023 struktur perekonomian di Kabupaten Landak masih sangat didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Sektor berikutnya yang mempunyai peranan cukup berarti dalam pembentukan PDRB Kabupaten Landak adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang sebesar 15,08% dan sektor Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar 10,01% pada pembentukan PDRB Kabupaten Landak tahun 2023.

Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Landak (persen) 2018-2023

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,11	5,68	1,53	5,03	2,73	1,45
Pertambangan dan Penggalian	4,02	3,82	0,63	5,18	-0,03	-3,31
Industri Pengolahan	3,03	4,82	-1,00	5,75	3,37	2,73
Pengadaan Listrik dan Gas	2,78	4,37	12,31	1,34	4,23	15,58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,75	7,00	4,45	6,41	6,48	6,84
Konstruksi	3,89	4,04	-2,46	5,48	0,85	4,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,83	5,22	-4,43	3,77	12,39	7,22
Transportasi dan Pergudangan	5,94	5,16	-6,64	-7,14	18,78	5,70



Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,32	6,66	17,5 5	5,93	9,48	7,83
Informasi dan Komunikasi	6,15	7,03	8,00	8,14	5,37	8,21
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,99	-0,87	-0,45	3,54	1,85	5,23
Real Estat	4,03	2,72	1,22	4,39	0,32	10,0 2
Jasa Perusahaan	4,47	4,48	-3,76	0,61	11,6 8	9,22
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,13	5,38	2,06	-1,11	0,93	6,23
Jasa Pendidikan	3,35	4,31	-5,41	5,06	6,01	8,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,87	4,22	12,8 3	34,0 2	9,10	14,3 0
Jasa lainnya	5,64	4,74	12,0 4	0,84	13,4 1	16,8 0
PDRB Landak	5,09	5,01	-0,67	4,89	4,65	4,39
PDRB Kalimantan Barat	5,07	5,09	-1,83	4,80	5,07	4,46

Sumber: Kabupaten Landak dan Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Tabel 3. 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Landak

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.429,91	3.717,95	3.844,66	4.247,15	4 700,21	5.049,21
Pertambangan dan Penggalian	237,30	253,20	263,43	287,23	289,81	282,98
Industri Pengolahan	1.116,52	1.187,36	1.195,97	1.321,50	1 441,83	1.450,40
Pengadaan Listrik dan Gas	0,89	0,99	1,15	1,19	1, 26	1,46
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,39	1,51	1,60	1,74	1,86	2,06
Konstruksi	983,45	1.044,02	1.067,93	1.154,33	1 223,55	1.283,38
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.438,08	1.572,53	1.556,52	1.627,05	1 902,87	2.062,93
Transportasi dan Pergudangan	199,45	220,77	227,10	217,91	277,25	326,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	261,70	288,59	246,57	264,82	290,12	314,39



Informasi dan Komunikasi	291,88	322,37	352,39	381,70	402,78	433,31
Jasa Keuangan dan Asuransi	253,38	258,11	255,40	274,70	294,76	306,78
Real Estat	320,41	343,06	347,67	355,21	361,68	390,95
Jasa Perusahaan	49,71	53,34	50,74	50,75	57,56	63,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	702,45	776,65	825,78	830,24	880,34	940,09
Jasa Pendidikan	242,71	260,80	246,10	261,62	277,49	302,81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160,21	176,88	204,86	280,98	307,43	352,31
Jasa lainnya	65,67	71,56	58,43	56,03	64,95	76,69
PDRB	9.755,30	10,549,68	10.746,29	11.614,17	12.775,76	13.684,30

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka 2024, BPS

Tabel 3. 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Landak (miliar rupiah), 2018-2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020 (M)	2021 (M)	2022 (M)	2023 (M)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	244.775,92	2.604,73	2.644,46	2.775,45	2.851,18	2.892,20
Pertambangan dan Penggalian	144.162,20	148,17	149,10	156,82	156,78	151,59
Industri Pengolahan	811.538,03	845,98	837,54	885,50	915,37	940,40
Pengadaan Listrik dan Gas	573,34	0,60	0,67	0,68	0,71	0,82
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.057,36	1,13	1,18	1.251,6	1.332,6	1,42
Konstruksi	565.557,50	580,76	566,45	596,96	602,05	630,95
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.038.398,08	1.087,21	1.039,08	1.078,23	1.211,8	1,299
Transportasi dan Pergudangan	134.420,32	140,91	131,55	122,15	145,101	153,38
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	178.165,43	189,27	156,06	165,30	180,98	195,16
Informasi dan Komunikasi	200.200,08	215,46	232,69	251,63	265,14	286,91
Jasa Keuangan dan Asuransi	191.036,34	188,73	187,88	194,53	198,12	208,48



Real Estat	217.688,4 1	221,59	224,29	233,62	234,36	257,85
Jasa Perusahaan	31.267,22	32,67	31,44	31,63	35,33	38,58
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	410.876,9 4	432,97	441,87	436,95	441,02	468,50
Jasa Pendidikan	170.051,5 0	175,81	166,29	174,71	185,21	200,99
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	105.366,4 1	109,82	123,91	166,06	181,17	207,08
Jasa lainnya	44.417,69	46,52	40,79	41,13	46,65	54,49
PDRB	6.710.002, 78	7.022,1 8	6.975,2 7	7.312,6 6	7,652,35	7.988,2 0

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka 2023, BPS

PDRB Perkapita, PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. PDRB per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Landak pada tahun 2023 adalah 33,08 juta rupiah meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 31,51 juta rupiah. Yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Landak selama setahun adalah pada tahun 2023 adalah sebesar 33,08 juta rupiah. Hal ini dapat terjadi akibat semakin membaiknya iklim usaha investasi tiap – tiap sektor usaha sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat di Kabupaten Landak.

3.1. 2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Landak, akan banyak dipengaruhi tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional Kabupaten Landak sendiri.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 tertuang sejumlah sasaran ekonomi makro pemerintah yang hendak dicapai dalam kurun lima tahun kedepan.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Gross National Income (GNI)



per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD 5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2025. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan. Pada RKP tahun 2024, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,5% - 7,5 persen dan 5,0 - 5,7 persen; tingkat rasio gini menurun menjadi 0,374-0,377; dan IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 73,99 - 74,02.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

Pemerintah Kabupaten Landak sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 pada kisaran 4,94 persen, yang masih dibawah kisaran target asumsi makro pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar 5,3-5,7 persen (Rancangan Awal RKP). Kebijakan ekonomi makro Kabupaten Landak sebagaimana sasaran Nasional tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (*pro growth, pro job dan pro poor*), serta pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.

Jumlah investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Terdapat dua jenis investasi menurut sumbernya, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri/asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi skala nasional yang menjadi penyumbang pendapatan daerah yang besar. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Data menunjukkan bahwa nilai investasi berskala nasional di tahun 2021



dengan nilai 479 740,60 juta rupiah, sedangkan di tahun 2022 dengan nilai 875 917,10 juta rupiah.

Selain itu stabilisasi perekonomian suatu negara sangat jelas dipengaruhi oleh faktor politik dan keamanan, disamping variabel ekonomi makro lainnya. Tanpa stabilitas politik dan keamanan yang kondusif dari suatu negara, ekonomi tidak akan bisa berbuat banyak terutama dalam hubungannya dengan posisi dari suatu negara dalam memperbaiki variabel-variabel ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi saat ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi perpolitikan dan stabilitas keamanan di Indonesia.

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,98 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,51 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dialami oleh Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang, yaitu sebesar 45,40 persen. Ekonomi Kalimantan Barat triwulan I-2024 terhadap triwulan IV-2023 mengalami kontraksi sebesar 0,51 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami kontraksi terdalam sebesar 12,45 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran, komponen yang mengalami kontraksi terdalam adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP), yaitu sebesar 3,01 persen. Secara struktur, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi struktur ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan I-2024 dengan kontribusi sebesar 22,83 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 49,28 persen.

Untuk PDRB menurut pengeluaran pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang berkontraksi sedalam 13,98 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai pengurang yaitu sebesar 45,40 persen; diikuti oleh Komponen PK-LNPRT sebesar 29,63 persen; Komponen PMTB sebesar 10,06 persen; Komponen PK-RT sebesar 5,22 persen; dan Komponen PK-P sebesar 4,53 persen. Struktur PDRB Kalimantan Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kalimantan Barat masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup hampir separuh PDRB Kalimantan Barat yaitu sebesar 49,28 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 32,22 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 15,00 persen; Komponen PK-P sebesar 10,55 persen; Komponen Impor Barang dan



Jasa sebagai pengurang sebesar 9,30 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,49 persen. (Berita Resmi Statistik No. 28/05/61/Th. XXVII, 6 MEI 2024)

Prospek Perekonomian Daerah dengan dinamika perekonomian global yang masih dibayangi oleh ketidakpastian yang tinggi, divergensi pertumbuhan antar negara dan ketegangan geopolitik diperkirakan akan berdampak terhadap harga energi dan pangan dan inflasi global. Respons kebijakan moneter ketat diperkirakan masih akan berlangsung sebagaimana tercermin dari kenaikan suku bunga. Perekonomian Kalimantan Barat tahun 2024 diperkirakan masih akan melanjutkan pertumbuhan secara moderat. Kinerja lapangan usaha utama dan tingkat konsumsi masyarakat diperkirakan masih cukup kuat ditambah perbaikan kinerja ekspor menjadi sentimen positif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian setempat. Untuk keseluruhan tahun 2024, inflasi di Kalimantan Barat diperkirakan bergerak stabil pada rentang sasaran target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat didorong oleh peningkatan pagu anggaran APBD. Peningkatan anggaran belanja pada APBN 2024 juga berdampak pada peningkatan belanja pemerintah pusat di daerah melalui kementerian dan lembaga lainnya. Selain itu, penyaluran bantuan sosial pemerintah di tahun 2024 yang terus berlanjut diperkirakan mampu mendorong konsumsi pemerintah.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Landak untuk tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5,01%. Dasar proyeksi tersebut hasil analisa pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yaitu sebesar 4,65% sedikit menurun dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 4,89%. Secara umum di Provinsi Kalimantan Barat dan secara khusus di Kabupaten Landak, selain itu sebagai acuan berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku Kabupaten Landak Tahun 2018 - 2023 ada 5 (lima) sektor yang tidak terpengaruh oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid tersebut dan bisa dianalisa bahwa sektor-sektor tersebut merupakan fundamental perekonomian di Kabupaten Landak, adapun kelima sektor sebagai penyumbang kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Landak tersebut berdasarkan data time series Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Landak, 2018-2023



Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	35,16	35,24	35,78	36,57	36,79	37,23
2 Pedagang Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair Of Motor Vehicles and Motorcycles	14,74	14,91	14,48	14,01	14,89	15,08
3 Industri Pengolahan/Manufacturing	11,45	11,25	11,13	11,38	11,29	10,20
4 Konstruksi/Construction	10,08	9,9	9,94	9,94	9,58	9,38
5 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	7,20	7,36	7,68	7,15	6,89	6,87

Sumber: Kabupaten Landak Dalam Angka Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kelima sektor tersebut merupakan sektor penyumbang distribusi bagi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Landak bahkan pada saat pandemi covid pun kelima sektor tersebut tidak mengalami perlambatan ekonomi secara signifikan, dengan penjelasan sbb:

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing

Dengan rata- rata kontribusi sebesar 36,12% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian kehutanan dan perikanan merupakan salah satu penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Landak. Kontribusi output sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dianggap tidak penting dalam perekonomian di Kabupaten Landak. Banyak potensi yang dapat disumbangkan oleh sektor pertanian terhadap perekonomian daerah, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan penduduk pedesaan, pemasok pangan, penggerak transaksi domestik dan lainnya. Mengingat begitu pentingnya Kontribusi output sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Landak, maka kemajuan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sangat perlu tetap dijaga untuk menjamin ketersediaan pangan



bagi penduduk dan menghindari dari bahaya kelaparan apalagi Kabupaten Landak merupakan salah satu kabupaten yang berbasis pada sektor pertanian karena sektor ini merupakan salah satu potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Landak disamping sub sektor lainnya, serta dapat pula menjadi penunjang pertumbuhan sektor usaha lainnya, Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Landak menempatkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai elemen penting dalam perumusan kebijakan yang akan diterapkan dan terbukti berhasil menjaga kesinambungan sektor ini dalam memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Landak bahkan dimasa pandemic covid sekalipun.

2. Sektor usaha Pedagang Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair Of Motor Vehicles and Motorcycles

Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran sepanjang tahun 2023 terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Landak sebesar 15,08% sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2022 diawal masa pandemi covid yaitu sebesar 14,89%, tetapi secara umum dalam data series yang tersaji pada tabel diatas sektor perdagangan besar dan eceran dalam pembentukan produk domestik regional bruto di Kabupaten Landak cenderung stabil dalam menyumbang distribusi kontribusi bagi pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Landak dengan rata menyumbang 14 – 15 % bagi pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) pada periode 2018 sampai 2023.

3. Sektor Usaha Industri Pengolahan/Manufacturing

Sektor industri manufaktur masih mencatatkan kinerja positif dengan menyumbangkan kontribusi bagi pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 11,29% di tahun 2022 dan menurun menjadi 10,20% pada tahun 2023, penurunan pesanan domestic dan luar negeri, masih banyak persediaan produk, ketersediaan bahan baku dan factor musiman, melemahnya permintaan global untuk produk ekspor industri.

Strategi pemulihan ekonomi yang dapat berkaitan dengan industri pengolahan antara lain: (1) peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dalam tingkat yang kompetitif; (2) penyediaan stimulus dunia usaha; (3) pemulihan tenaga kerja dan pemulihan jam kerja melalui rehiring dan retraining tenaga kerja; (4) percepatan pembangunan Kawasan Industri Prioritas untuk menampung relokasi investasi; (5) perluasan pendanaan proyek industri prioritas; dan (6) peningkatan realisasi investasi yang



berskala besar dan menyerap tenaga kerja. Berbagai kebijakan ini sebenarnya telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir sehingga jika dilihat dari time series sektor usaha industry pengolahan/manufacturing termasuk salah satu sektor yang cukup stabil dalam menyumbang kontribusi bagi pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Landak.

4. Sektor Usaha Konstruksi/Construction

Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai upaya pendukung pergerakan perekonomian secara nasional juga terjadi di Kabupaten Landak dimana pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan berpengaruh pada sektor usaha konstruksi dan menjadi salah satu faktor meningkatnya peran sektor konstruksi terhadap perekonomian Kabupaten Landak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase sektor konstruksi terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Landak yang secara trend konsisten menyumbang 9 – 10% dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) selama 5 (lima) tahun terakhir, Walaupun terjadi pandemi covid ditahun 2020 sehingga mengakibatkan perlambatan ekonomi dan sampai saat ini masih belum mereda meskipun penularannya telah dapat dikendalikan, pembangunan infrastruktur tidak bisa diabaikan untuk tidak dilaksanakan karena dengan pembangunan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tadi dimana peran sektor konstruksi dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja, penanaman modal, jumlah proyek infrastruktur dan bangunan, hubungan timbal balik dengan sektor sektor pendukung, bahkan menjadi fasilitator dalam pergerakan dan pertumbuhan barang dan jasa pemerataan pembangunan untuk semua sektor juga didukung oleh sektor konstruksi antara lain ketahanan pangan di tiap daerah, pemenuhan kebutuhan energi listrik, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, akses jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa, dan peningkatan daya tarik pariwisata.

5. Sektor Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence, Compulsory Social Security

Sektor usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib jika dilihat dari tabel diatas cenderung stabil memberikan pengaruh positif dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Landak walaupun ada penurunan tetapi tidak signifikan dan penurunan tersebut hanya berkisar beberapa point saja tetapi secara



umum sektor ini secara konsisten mendistribusikan angka 7% bahkan disaat awal pandemic covid tahun 2020 sektor usaha ini menyumbang 7,68-8% bagi produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Landak.

Selain mempertimbangkan kontribusi 5 (lima) sektor lapangan usaha tersebut pada periode 2018 – 2023, diamati pula data perkembangan PDRB 2018-2023 Kabupaten Landak yang diolah melalui metode Tipologi Klassen, terdapat beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi serta memiliki kriteria “sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat” seperti dapat dilihat pada tabel perkembangan sektor-sektor berikut ini :

Tabel 3. 5 Pertumbuhan dan Kontribusi Kabupaten Landak terhadap Provinsi Kalimantan Barat

<u>Kategori</u>	<u>Uraian</u>	<u>Kab. Landak</u>	
		<u>Rata-Rata Pertumbuhan</u>	<u>Rata-Rata Kontribusi</u>
A	<u>Pertanian, Kehutanan, Perikanan</u>	1,5	37,23
B	<u>Pertambangan dan Penggalian</u>	-3,33	2,07
C	<u>Industri Pengolahan</u>	2,7	10,60
D	<u>Pengadaan Listrik dan Gas</u>	15,6	0,01
E	<u>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</u>	6,8	0,02
F	<u>Konstruksi</u>	4,8	9,38
G	<u>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</u>	7,2	15,08
H	<u>Transportasi Pergudangan</u>	5,7	2,38
I	<u>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</u>	7,8	2,30
J	<u>Informasi dan Komunikasi</u>	8,2	3,17
K	<u>Jasa Keuangan dan Asuransi</u>	5,2	2,24
L	Real Estate	10,0	2,86
M,N	<u>Jasa Perusahaan</u>	9,2	0,46
O	<u>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</u>	6,2	6,87
P	<u>Jasa Pendidikan</u>	8,5	2,21
Q	<u>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</u>	14,3	2,57
R,S,T,U	<u>Jasa Lainnya</u>	16,8	0,56

Sumber : FFP bappeda dan data PDRB distribusi BPS 2024

Berdasarkan tabel diatas terdapat 6 (enam) sektor lapangan usaha potensial dan berkembang dalam produk domestik regional bruto kabupaten Landak, sektor ini potensial dan berkembang berdasarkan data produk domestik regional bruto pertumbuhannya stabil. adapun keenam sektor tersebut meliputi:

1. Sektor Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor



Sektor perdagangan besar ini meliputi perusahaan atau industri yang cenderung membeli dalam jumlah besar dan langsung dari pabrik untuk dijual kembali seperti grosir, eksportir, dan importir. Pedagang eceran membeli dari pedagang besar dan menjualnya secara langsung ke konsumen secara eceran. Kontribusi sektor ini mengalami penurunan pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 kontribusinya 14,89% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan pada tahun 2023 kontribusinya naik diangka 15,08%. Kondisi ini berpeluang untuk meningkatkan pertumbuhan ataupun kontribusi yang ada di Kabupaten Landak, melihat trend yang baik pada sektor ini diharapkan juga akan terus menjaga trend positif guna untuk mendongkrak lapangan usaha, kontribusi kepada angka Provinsi dan juga pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Landak, agar dapat menyentuh target/proyeksi yang telah ditetapkan.

2. Sektor Usaha Pengadaan Listrik Dan Gas

Walaupun sektor ini belum terlalu signifikan dalam menyumbang kontribusi dan pertumbuhan bagi pembentukan produk domestik regional bruto Kabupaten Landak tetapi pertumbuhannya cenderung stabil dan memberikan trend positif, Kabupaten Landak diharapkan bisa menjaga stabilitas bahkan bisa meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi pada sektor ini dimana masih banyak daerah di Kabupaten Landak yang belum mendapatkan aliran listrik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

3. Sektor Usaha Informasi dan Komunikasi

Sektor usaha informasi dan komunikasi ini juga cenderung stabil dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Landak dan pertumbuhannya secara rata-rata juga lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Provinsi Kalimantan Barat, meskipun kontribusi/distribusi pada 2022 memang mengalami penurunan tidak signifikan, tetapi pada 2023 cenderung naik/positif kembali.

4. Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha sektor transportasi dan pergudangan mengalami kenaikan untuk distribusi/kontribusi setiap tahun, meskipun memang bukan sektor ini bukan sektor basis dan berdaya saing di Kabupaten Landak, tetapi dengan trend yang baik setiap tahunnya diharapkan sektor ini akan terus berkembang dan memberi kontribusi lapangan usaha yang positif bagi perkembangan sektor yang ada di Kabupaten Landak.

5. Sektor Usaha Jasa Perusahaan



Pandemi global Covid-19 berdampak besar terhadap perkembangan sektor jasa nasional tanpa terkuali Kabupaten Landak yang merupakan bagian integral NKRI. Pada 2020, pertumbuhan sektor jasa perusahaan mengalami kontraksi sebesar -3,76 persen, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi 2019 yang mencapai 4,48 persen namun secara trend data series pertumbuhan sektor ini masih lebih tinggi dari pertumbuhan Provinsi Kalimantan Barat, bounce back dari tahun pandemi covid sektor ini terus mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan.

6. Sektor Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib.

Berdasarkan data pada tabel di atas sektor usaha ini juga tergolong sektor potensial di Kabupaten Landak dan tidak menutup kemungkinan juga menjadi sektor prima jika potensi-potensi yang ada dalam pembentukan sektor usaha ini lebih dioptimalkan dan secara pertumbuhan sektor usaha ini menyumbang 3,72 persen lebih tinggi dari pertumbuhan provinsi Kalimantan Barat sebesar 1,91 persen.

Memperhatikan hal-hal di atas, sasaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Landak pada tahun 2024 yang diperkirakan sebesar 4,94% persen diharapkan tidak sekedar bertumbuh dalam arti peningkatan nilai PDRB-nya saja namun juga dalam arti luas dan berkualitas, seperti:

1. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong mengatasi kesenjangan seperti kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar sektor pembangunan;
2. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pengurangan angka kemiskinan;
3. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong membuka kesempatan kerja sekaligus upaya pengurangan angka pengangguran.

Berdasarkan pengamatan lingkungan saat ini, dengan mempertimbangkan faktor-faktornya baik secara internal maupun eksternal, maka dirancang Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 dengan sumber dari sektor-sektor yang sama dengan skala prioritas berdasarkan urutan berikut ini:

1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan;
2. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
3. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
4. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
5. Jasa pendidikan;
6. Pengadaan listrik dan gas;
7. Informasi dan komunikasi;
8. Industri pengolahan;
9. Jasa keuangan dan asuransi;
10. Jasa perusahaan;



11. Jasa lainnya;
12. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
13. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
14. Pertambangan dan penggalian;
15. Konstruksi;
16. Real estate;
17. Transportasi dan pergudangan;

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kabupaten Landak Dalam Angka BPS, Tingkat Pengangguran Kabupaten Landak pada tahun 2023 sebesar 2,24%, memang tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022, maka untuk memkasimalkan sektor lapangan usaha yang ada, peluang diversifikasi lapangan usaha diharapkan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Kabupaten Landak. Tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan sebesar 2,19%.

Keenam sektor lapangan usaha ini yang secara tren selalu menunjukkan hasil positif meskipun tidak signifikan dan bukan merupakan sektor basis dan berdaya saing tetapi berpeluang untuk dikembangkan. Berikut tabel asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD 2024 :

Tabel 3. 6 Proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Landak Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Satuan	Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,65	4,94
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	68,14	68,18
3.	Angka Kemiskinan	%	9,97	9.60
4.	Angka Pengangguran (TPT)	%	2,24	2,19
5.	Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	%	0,27	0,29 - 0,30
6.	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp. (Juta)	33,08	33,16

Sumber : Data Badan Pusat Statistik, RPJMD/RPD Kab. Landak Tahun 2023-2026, Penyesuaian dengan Target Provinsi Kalimantan Barat (Rakortekrenbang) dan Hasil Penyesuaian Perhitungan Bappeda KEMD

3.1. 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2024

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Landak tahun 2024 tentunya dipengaruhi kondisi ekonomi Provinsi dan Nasional tahun sebelumnya dan yang tantangan serta prospek ekonomi kedepan. Pendekatan perhitungan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Landak dengan memperhatikan angka inflasi yang terjaga setiap tahunnya 2,09 persen pada 2023 dan kurs nilai tukar 15.300 - 16.000 sehingga diperoleh target pertumbuhan tahun 2024 dengan mempertimbangkan asumsi faktor pendorong sebagai berikut:



Sektor utama yang menjadi sektor basis dan berdaya saing di Kabupaten Landak, mengingat memang khususnya untuk pangan, Kabupaten Landak adalah salah satu lumbung pangan yang ada di Kalimantan Barat, juga dengan adanya program yang bertujuan menjaga lahan pangan agar tidak alih fungsikan juga menjadi factor bahwa sektor ini masih akan tetap menjadi basis beberapa tahun kedepan, serta harga jual sawit yang cenderung sudah mulai stabil sehingga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan yang ada.

Potensi Kawasan Industri Landak (KIL) yang kembali masuk dalam pentapan kawasan industri nasional, diharapkan bisa menjadi pintu pembuka untuk merangsang sektor industry pengolahan di Kabupaten Landak, serta bisa berefek pada banyak sektor lainnya dan penyerapan tenaga kerja yang ada.

Berlanjutnya proyek konstruksi Pemerintah pasca pemulihan pandemi Covid 19 seperti infrastruktur jalan baik jalan nasional maupun jalan provinsi dan kabupaten serta fasilitas umum.

Sektor perdagangan lebih kuat seiring dengan perkiraan membaiknya perekonomian global serta bounce back pertumbuhan sektor ini pasca pandemi Covid 19, sektor perdagangan besar meliputi perusahaan atau industri yang cenderung membeli dalam jumlah besar dan langsung dari pabrik untuk dijual kembali seperti grosir, eksportir, dan importir. Pedagang eceran membeli dari pedagang besar dan menjualnya secara langsung ke konsumen secara eceran.

Tabel 3. 7 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Landak

PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)		
	Realisasi 2023	Outlook 2024	Target 2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,45	3,07	3,17 - 3,39
Pertambangan dan Penggalian	-3,31	3,14	3,21 - 3,42
Industri Pengolahan	2,73	4,60	4,61 - 5,03
Pengadaan Listrik dan Gas	15,6	6,45	6,59 - 7,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah/Limbah,Daur Ulang	6,84	5,08	5,19 - 5,53
Konstruksi	4,80	6,75	6,78 - 7,35
Perdagangan Besar/Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	7,22	7,28	7,30 - 7,57
Transportasi dan Pergudangan	5,70	6,65	6,67 - 6,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,83	6,21	6,23 - 6,46
Informasi dan Komunikasi	8,21	7,96	7,99 - 8,28
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,23	6,55	6,69 - 7,13



Real Estate	10,0	5,9	6,0	-	6,5
Jasa Perusahaan	9,22	6,53	6,67	-	7,11
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan/ Jamsos Wajib	6,23	2,28	2,33	-	3,31
Jasa Pendidikan	8,52	7,12	7,18	-	7,44
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,30	9,88	9,91	-	10,03
Jasa lainnya	16,80	6,50	6,52	-	6,75
PDRB	4,39	4,94	4,52	-	5,45

Sumber: KEMD 2024

Untuk sisi Pengeluaran, akan diperkirakan bahwa konsumsi rumah tangga akan naik cukup signifikan seiring naiknya konsumsi LNPRT karena adanya pilkada serentak di semua Kabupaten, dan juga karenaterkendalnya harga barang dan inflasi yang stabil di Kabupaten Landak.

Tabel 3. 8 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat dari Sisi Pengeluaran tahun 2023 -2024

PDRB Berdasarkan Pengeluaran	Pertumbuhan (%)				
	Realisasi 2023	Outlook 2024	Target 2024		
Konsumsi Rumah Tangga	5,57	5,58	5,60	-	5,80
Konsumsi LNPRT	9,21	11,45	4,01	-	4,21
Konsumsi Pemerintah	1,85	2,24	2,29	-	3,26
Pembentukan Modal Tetap bruto	7,79	6,04	6,07	-	6,57
Perubahan Inventori	30,38	-29,41	6,07	-	6,57
Net Ekspor	-121,49	-313,28	-17,26	-	27,31
PDRB	4,39	4,94	4,52	-	5,45

Sumber: KEMD 2024 Bappeda

Tercapai atau tidaknya target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2024 akan sangat ditentukan oleh beberapa hal, antara lain:

Pengendalian inflasi secara optimal dan berjalan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan juga ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga terhadap masyarakat sehingga meningkatkan stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang dapat terkendali.

Kondisi politik yang terjaga atau kondusif serta kondisi geopolitik dunia yang juga kondusif akan menjadi aspek yang penting bagi pertumbuhan baik dari sisi pengeluaran maupun sisi lapangan usaha.



Adanya mitigasi atau rencana penanggulangan bencana/iklim yang akan mempengaruhi khususnya sektor pertanian atau pangan yang menjadi sektor basis dan berdaya saing.

Optimalisasi kawasan industri seperti contoh bisa masuknya investor dan akan secara tidak langsung memberikan multiplier efek kepada pertumbuhan daerah.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 akan menjadi landasan awal sebagai baseline dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Landak 2025 – 2045 dan sebagai target awal dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak tahun 2025-2029.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan nasional dan provinsi yang terjadi di tahun 2023 memberikan cukup dampak bagi pencapaian sasaran pembangunan. Harapan dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Landak yang tetap optimis kedepannya membawa dampak baik pula terhadap penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Kemiskinan dan tingkat kesenjangan (Rasio Gini), serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

3.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan, dalam pengelolaan keuangan daerah harus dihasilkan suatu kebijakan keuangan daerah yang akurat dan cermat, Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dalam pencapaian suatu pembangunan daerah memerlukan dukungan penganggaran yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu juga dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum. Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan, dalam pengelolaan keuangan daerah harus dihasilkan suatu kebijakan keuangan daerah yang akurat dan cermat, Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan



pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dalam pencapaian suatu pembangunan daerah memerlukan dukungan penganggaran yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu juga dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum. Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Daerah.

Berbagai faktor yang mempengaruhi terkait pendapatan, pengeluaran/belanja dan pembiayaan yang mendorong perubahan dalam kerangka pendanaan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Faktor Umum yang Mempengaruhi Perubahan Pendanaan dalam RAPBD

Perubahan TA 2024

No.	Faktor Perubahan	Uraian
1.	Pendapatan	a. Perubahan Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu adanya Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari provinsi.
2.	Pengeluaran/Belanja	a. Adanya perubahan kebijakan pendanaan program untuk penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAU) sesuai dengan PMK Nomor 134/PMK/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan PMK Nomor 110/PMK/2023 Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya. b. Perubahan belanja oleh Perangkat Daerah memperhitungkan perubahan dari pendapatan baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan.
3.	Pembiayaan	Penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengkoreksi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan pengeluaran pembiayaan.



3.2.1. Analisis Kinerja Keuangan Periode Tahun 2021-2023

A. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah dan pinjaman daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAK, DAU dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 - 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Landak

Uraian	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan (%)
PENDAPATAN	1.269.297.662.308,11	1.564.325.055.441,97	1.338.510.857.504,99	0,99%
Pendapatan Asli Daerah	61.644.009.497,14	82.385.456.698,00	62.613.089.144,18	-3,20%
Hasil Pajak Daerah	28.759.935.294,00	42.000.978.373,00	22.967.298.697,00	-25,67%
Hasil Retribusi Daerah	2.358.151.977,00	2.977.222.200,00	3.243.908.588,00	14,51%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.237.816.479,43	5.303.279.113,00	6.167.277.283,00	7,62%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	25.288.105.746,71	32.103.977.012,00	30.234.604.576,18	7,52%
Dana Perimbangan	965.882.361.897,00	1.240.168.307.830,00	1.251.345.040.238,81	11,51%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	951.222.361.897,00	1.171.898.864.196,00	1.162.679.270.371,00	9,02%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.660.000.000,00	68.269.443.634,00	88.665.769.867,81	50,76%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	241.771.290.913,97	241.771.290.913,97	24.552.728.122,00	-442,35%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55.738.076.513,97	55.738.076.513,97	24.012.728.122,00	-66,06%
Pendapatan Lainnya	186.033.214.400,00	186.033.214.400,00	540.000.000,00	n/a



Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Landak 2020-2022 - BPKAD Kabupaten Landak, 2024 (Diolah)

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis belanja tidak langsung daerah digunakan untuk melihat realisasi dari kebijakan pembelanjaan tidak langsung daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa yang akan datang.

Tabel 3. 11 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Landak

Uraian	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan (%)
BELANJA	1.237.781.647.548,61	1.365.900.343.641,00	1.365.089.477.794,95	4,66%
BELANJA OPERASI	789.903.998.512,61	898.045.465.640,00	924.558.952.381,87	7,45%
Belanja Pegawai	385.539.079.470,40	438.334.666.141,00	451.837.861.285,18	7,52%
Belanja Barang dan Jasa	373.877.572.738,21	427.202.455.124,00	425.454.051.746,69	6,04%
Belanja Hibah	30.237.746.304,00	32.237.104.375,00	46.867.439.350,00	18,71%
Belanja Bantuan Sosial	249.600.000,00	271.240.000,00	399.600.000,00	20,05%
BELANJA MODAL	189.707.769.298,00	217.869.768.388,00	203.606.183.415,28	2,96%
Belanja Modal	189.707.769.298,00	217.869.768.388,00	203.606.183.415,28	2,96%
BELANJA TIDAK TERDUGA	19.949.484.324,00	12.267.957.322,00	6.046.364.527,00	-82,76%
Belanja Tidak Terduga	19.949.484.324,00	12.267.957.322,00	6.046.364.527,00	-82,76%
BELANJA TRANSFER	238.220.395.414,00	237.717.152.291,00	230.877.977.470,80	-1,59%
Belanja Bantuan Keuangan	238.220.395.414,00	237.717.152.291,00	230.877.977.470,80	-1,59%

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Landak 2019-2021 - BPKAD Kabupaten Landak, 2024.



3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan dirumuskan kembali dalam penyusunan RPJMD/RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dapat diproyeksikan kerangka pendanaan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 12 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024
Kabupaten Landak**

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.547.726.027
4.1.01	Pajak Daerah	54.170.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.460.440.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.030.527.650
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.886.758.377
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.285.099.379.469
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.233.073.354.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.026.025.469
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.100.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	600.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.500.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.415.747.105.496
5	BELANJA DAERAH	
05.01	BELANJA OPERASI	1.025.882.416.865
5.1.01	Belanja Pegawai	569.567.450.143
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.814.277.320
5.1.05	Belanja Hibah	53.400.689.402
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000
05.02	BELANJA MODAL	187.160.060.251
5.2.01	Belanja Modal Tanah	60.460.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.689.533.715
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.475.066.243
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.860.000.293
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.564.765.780
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.564.765.780
05.04	BELANJA TRANSFER	234.539.862.600
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.763.044.000



5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	228.776.818.600
	Jumlah Belanja	1.453.147.105.496
	Total Surplus/(Defisit)	-37.400.000.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.600.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.600.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.600.000.000
	Pembiayaan Netto	37.400.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0
	TOTAL APBD	1.455.747.105.496

Sumber: Hasil Perhitungan (Olahan) dari LRA Kabupaten Landak 2010-2022, Anggaran Berjalan Kabupaten Landak Tahun 2024 dan RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari RPJMD. Dengan demikian, RKPD disusun berpedoman pada RPJMD. RKPD Kabupaten Landak Tahun 2024 disusun berpedoman pada RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026. Pelaksanaan RPD dalam bentuk RKPD bertujuan agar target-target pembangunan jangka menengah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan isu strategis yang ada di Kabupaten Landak, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu empat tahun. Sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing Tujuan RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 beserta indikator kinerjanya, disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Tujuan RPD Kabupaten Landak

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal RPD	Target Capaian Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berkualitas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	88,51	88,80	89,30	89,90	90,02	90,02
	2. Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	B
	3. Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	0,50	0,52	0,54	0,55	0,57	0,57
	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,56	65,76	65,86	65,96	66,06	66,06
Meningkatkan kontribusi sumber daya alam bagi perekonomian daerah	Presentase Pertumbuhan Ekonomi	2,38	4,05	4,68	4,93	5,01	5,01
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan	Indeks Desa Membangun	0,7135	0,7385	0,751	0,7635	0,776	0,776



Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Persentase Tingkat Kemiskinan	10,99	10,06	9,66	9,26	8,86	8,86
	2. Indeks Pembangunan Manusia	66,21	66,54	66,86	67,19	67,51	67,51



Tabel 4. 2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Landak 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	IK SASARAN	KONDIS I AWAL RPD	TARGET					KONDIS I AKHIR RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	2026	
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	88,51	88,80	89,30	89,90	90,02	90,02	
	2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	21,78	31,04	32,26	33,86	35,87	35,87	
	3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	19,90	21,00	21,50	22,00	22,50	22,50	
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	15,50	17,00	17,50	18,00	18,50	18,50	
		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	8,81	10,00	10,50	11,00	11,50	11,50	
		Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	14,18	15,50	16,00	16,50	17,00	17,00	
		Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	B	
	4. Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah SPBE yang dibangun dan dikembangkan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	67	71	73	75	77	77	
		Persentase ketersediaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	71,43	
		Jumlah Website yang dikelola dan dikembangkan Pemerintah Daerah	41	45	47	49	51	51	
		Indeks Profesionalitas ASN	46,34	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	



TUJUAN	SASARAN	IK SASARAN	KONDIS I AWAL RPD	TARGET				KONDIS I AKHIR RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	2026
	5. Meningkatnya profesionalitas ASN dan tata kelola administrasi kepegawaian yang semakin baik dan berkualitas	Persentase tata Kelola Administrasi Kepegawaian yang berkualitas	53,35	65,49	73,15	67,87	78,69	78,69
	6. Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan inovasi daerah	Persentase hasil Litbang yang diterapkan (%)	10	12	13	14	15	15
		Predikat Indeks Inovasi Daerah	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
	7. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan dan tugas DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



TUJUAN	SASARAN	IK SASARAN	KONDIS I AWAL RPD	TARGET					KONDIS I AKHIR RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	2026	
		Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD							
	8. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Kurang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	9. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintah	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	2	2	2	2	2	2	
		Level kapabilitas APIP	2	2	2	2	2	2	
	10. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Pembangunan yang akurat dan reliabel	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	11. Terwujudnya Peran Persandian dalam Pelaksanaan Keamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	23,72	24,00	24,25	24,50	24,75	24,75	
	12. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi	Persentase kepemilikan data kependudukan	57,01	57,55	58,48	59,00	59,67	59,67	



TUJUAN	SASARAN	IK SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET					KONDISI AKHIR RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	2026	
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai.	13. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar	62,00	63,00	64,00	65,00	65,00	65,00	
	14. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	Cakupan kinerja pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	56,00	57,00	61,00	63,00	67,00	67,00	
	15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	65,56	65,76	65,86	65,96	66,06	66,06	
	16. Meningkatnya konektivitas dan keselamatan jaringan transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	53,50	58,07	62,38	66,69	71,00	71,00	
		Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	77,13	82,85	88,57	94,28	100,00	100,00	
17. Meningkatnya aksesibilitas telekomunikasi dan internet	Menurunnya Desa Non Sinyal (<i>Blank Spot</i>) Area	28	26	24	22	20	18		



TUJUAN	SASARAN	IK SASARAN	KONDIS I AWAL RPD	TARGET					KONDIS I AKHIR RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	2026	
3. Meningkatkan kontribusi sumber daya alam bagi perekonomian daerah	18. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Inflasi (%)	1,16	3,74	3,56	3,42	3,11	3,11	
		PDRB Per kapita (juta Rp)	29,21	31,46	32,97	34,14	35,76	35,76	
		Indeks Gini	0,206	0,206	0,206	0,205	0,205	0,205	
	19. Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	Angka Produksi Sektor Pertanian (ton/thn)	153.645	135.063	137.159	139.366	141.903	141.903	
		Rata-Rata Persentase Tingkat Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan	34,45	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	36,13	36,5	37,2	37,9	38,5	38,5	
	20. Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	9,50	27,11	32,11	37,11	42,11	42,11	
		Nilai Transaksi Domestik	N/A	471.744.000	566.092.800	679.311.360	815.173.632	815.173.632	
		Persentase sarana dan prasarana perdagangan dikelola dengan baik	N/A	50,28	54,28	58,28	62,28	62,28	
	21. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Rasio Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	N/A	32,85	34,85	36,85	38,85	38,85	
		Rasio keanggotaan koperasi	N/A	6,50	8,50	10,50	12,56	12,56	
	22. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	2.28	2.38	2.43	2.48	2.53	2.53	
		Rasio pelaku usaha ekonomi kreatif	0	7	9	11	13	13	



TUJUAN	SASARAN	IK SASARAN	KONDIS I AWAL RPD	TARGET					KONDIS I AKHIR RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	2026	
	23. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi di Kabupaten	700,78	514,03	565,43 3	621,97	684,17 3	684,173	
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan	24. Meningkatnya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Desa Mandiri	13	18	23	28	34	34	
		Persentase BUMDes Sehat	N/A	5	6	8	8	8	
		Persentase TP. PKK tingkat desa aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	25. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik	Prosentase Penyusunan LPPDES, LKPPDES, IPPDES, LPRP-APBDES, LKPRP-APBDES, DAN IPRP-APBDES tepat waktu dan akuntabel	N/A	32,17	33,67	34,67	39,00	39,00	
	26. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan sosial masyarakat di pedesaan	Persentase Karang Taruna Aktif	N/A	1,92	3,2	4,48	6,41	6,41	
5. Meningkatkan kesejahteraan	27. Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,43	12,45	12,46	12,48	12,49	12,49	
		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,12	7,15	7,16	7,17	7,17	7,17	



TUJUAN	SASARAN	IK SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET					KONDISI AKHIR RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	2026	
masyarakat	28. Meningkatnya Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	40	40	47	54	61	61	
		Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	N/A	7	7	7	7	7	
		Jumlah Sanggar seni budaya yang berprestasi	N/A	7	7	7	7	7	
	29. Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	N/A	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	1,5	1,7	2,0	2,2	2,2	
	30. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,04	73,23	73,42	73,60	73,79	73,79	
	31. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	N/A	100	100	100	100	100	
	32. Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	10,99	9,55	8,84	8,12	7,4	7,4	
	33. Meningkatnya Pelayanan	Laju pertumbuhan penduduk	1,83	1,85	1,87	1,89	1,91	1,91	
Unmet Need KB		29,31	28,36	27,51	26,61	25,66	25,66		



TUJUAN	SASARAN	IK SASARAN	KONDIS I AWAL RPD	TARGET					KONDIS I AKHIR RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	2026	
	penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk								
	34. Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase anak korban kekerasan yang tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	35. Meningkatnya Kapasitas Daerah Menuju Kabupaten Layak Anak	Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak	Inisiasi	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	
	36. Meningkatnya Keterbukaan Lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,22	3,18	3,15	3,12	3,09	3,09	
	37. Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	75,6	73,0	75,0	77,0	79,0	79,0	
		Persentase ketersediaan pangan utama (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	404,55	200	200	210	220	220	



TUJUAN	SASARAN	IK SASARAN	KONDIS I AWAL RPD	TARGET					KONDIS I AKHIR RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	2026	
	dan Pemanfaatan Pangan								
	38. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	N/A	27,16	27,16	29,62	32,09	34,56	
	39. Meningkatnya budaya olahraga masyarakat	Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan (jenis)	N/A	1	2	2	3	3	
	40. Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Indeks risiko bencana	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
	41. Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00	
	42. Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Konflik	Persentase Potensi Gangguan / Konflik yang Teratasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024 disusun dengan mempedomani pencapaian RPJMN 2020-2024 termasuk agenda pembangunan nasional yang disebut juga dengan Nawacita, serta RKP Tahun 2024.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Landak tahun 2024 memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yang ditetapkan pada RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026.
- 2) Agenda pembangunan nasional dan strategi dalam pencapaian RPJMN 2020-2024.
- 3) Tema dan Prioritas pembangunan nasional tahun 2024 dalam Rancangan RKP Tahun 2023.
- 4) Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu.
- 5) Permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
- 6) Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

4.2.1. Pencapaian RPJMN Tahun 2020-2024

Perencanaan pembangunan Kabupaten Landak tidak lepas dari isu atau kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antardokumen perencanaan pembangunan. Sebelum menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2024, maka perlu dilakukan telaahan terhadap pencapaian RPJMN.

Rencana Kerja Pemerintah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah didalam mensinkronkan, menyelaraskan, mengharmonisasikan yang didasarkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Kebutuhan-kebutuhan dan prioritas di tahun 2023 karena RPJMN yang disusun Tahun 2020-2024 adalah merupakan tahapan terakhir di dalam pelaksanaan 5 tahun untuk tahap terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yaitu di dalam kerangka mewujudkan visi Indonesia adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Guna mewujudkan visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas



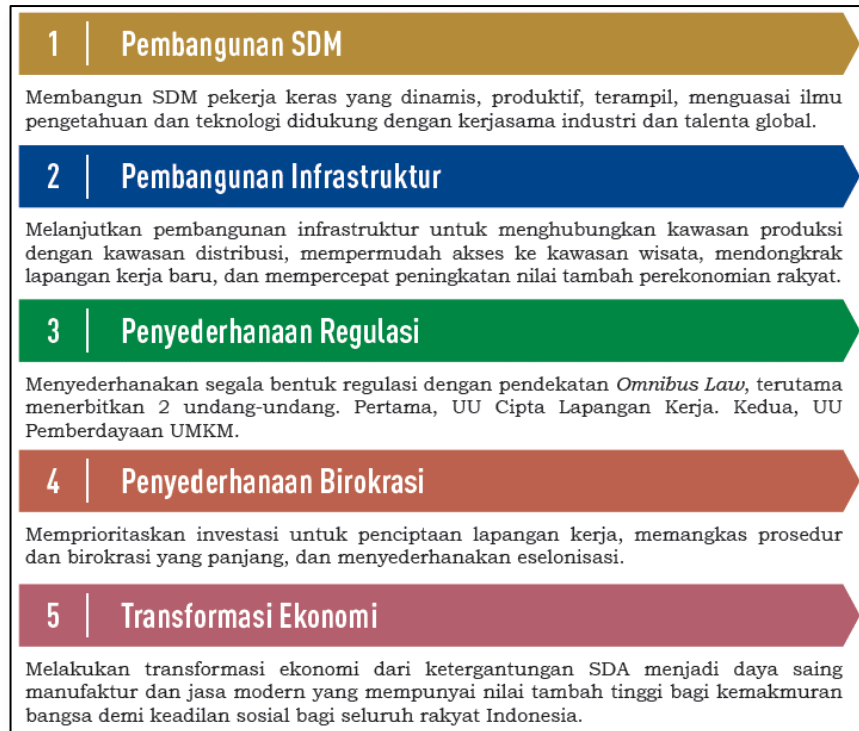
dalam bentuk misi Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 misi pemerintah meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya sesuai dengan RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.



Gambar 4. 1 Arah-an Utama Sebagai Strategi Dalam Pelaksanaan Misi Nawacita Dan Pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045

Sumber: Sumber : Lampiran I - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
 - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.



Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
 - b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
 - c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
 - d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
 - e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
 - MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
 - MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
 - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
 - MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
 - MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
 - Transformasi Digital.
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
 - b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
 - b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%



Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
- MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
- b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
- c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
- d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
- e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
- f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.

7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian: Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:

- a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
- b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
- c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Ibu Kota Nusantara;
- MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;



4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

4.2.2. Telaahan Rancangan RKP Tahun 2024

Mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2024. Lebih lanjut, pada Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya. Adapun Rancangan Tema RKP 2024, yaitu:

“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 : “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, sedangkan arah kebijakan RKP Tahun 2024, ada 8 dengan rincian; Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

Selanjutnya; penguatan daya saing usaha; pembangunan rendah karbon dan transisi energi; Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan Pelaksanaan Pemilu 2024.



Sasaran makro ekonomi Indonesia tahun 2024 adalah; Investasi dan ekspor perlu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sisi permintaan; Sasaran pertumbuhan tahun 2024 yakni 5,3-5,7%, dan Peningkatan produktifitas UMKM, Pertanian, dan Industri Manufactur sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi sisi produksi.

Pertumbuhan investasi pada tahun 2024 diharapkan 6,2-7,0% atau realisasi PMA dan PMDN Rp1.750 triliun, pertumbuhan ekspor nonmigas 4,5-6,8%, pertumbuhan Pertanian, kehutanan dan Perikanan 3,4%-3,8%, pertumbuhan industri manufactur 5,4%-5,8%, sehingga share Industri Manufactur meningkat menjadi 19,5%-20,6%.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.



Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;



- 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;



- 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.
 - g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
 - 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
 - h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
 - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana



pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
 - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
 - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan,
 - Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan,
 - Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan
 - Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - 3) kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) reforma agraria; dan
 - 4) perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 - 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
 - 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
 - 4) prestasi olahraga.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;



- 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
 - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan



- 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
 - 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
5. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
- b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) konektivitas jalan;
 - 2) konektivitas kereta api;
 - 3) konektivitas laut;
 - 4) konektivitas udara; dan
 - 5) konektivitas darat.
- c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) transportasi perkotaan; dan
 - 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.



- d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
 - e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) pengembangan industri hijau
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
 - c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
 - e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan keamanan dalam negeri;



- 2) penguatan keamanan laut; dan
- 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.2.3. Penetapan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Landak

Isu strategis yang dihadapi Kabupaten Landak selama kurun waktu 4 (empat) tahun mulai 2023 sampai dengan 2026 sebagaimana dirumuskan dalam RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026, masih menjadi isu yang relevan untuk pembangunan Tahun 2024. Isu strategis pembangunan Kabupaten Landak untuk Tahun 2024, meliputi:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas serta pelayanan publik yang responsif dan terukur.
2. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Melambatnya pertumbuhan ekonomi.
4. Belum optimalnya ketahanan sosial masyarakat.
5. Belum memadainya peningkatan sistem jaringan prasarana dan sarana dasar yang berkualitas dan terintegrasi.
6. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan pada perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.
7. Pengembangan potensi sumber daya alam dengan penggerak utama sektor pertanian dalam arti luas untuk kemandirian ekonomi.
8. Penguatan kemandirian desa sebagai pusat pembangunan daerah dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
9. Belum optimalnya peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang kondusif.

Kerangka pembangunan nasional jangka menengah yang disajikan di atas tentunya didukung dengan pembangunan daerah. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan daerah memegang peranan penting. Berkaitan dengan hal tersebut, pada RPD Kabupaten Landak telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan selama 4 (empat) tahun mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Tahapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Landak selama 4 (empat) tahun untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah disusun berdasarkan prioritas. Sasaran yang menjadi fokus untuk dicapai mulai tahun pertama pelaksanaan RPD berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik dan SDM yang tangguh sebagai landasan menuju Kabupaten Landak yang mandiri, maju dan sejahtera. Tahun pertama pelaksanaan



RPD diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Landak yang maju melalui peningkatan penyediaan infrastruktur dasar. Tahap selanjutnya adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Landak yang maju dan mandiri melalui percepatan penyediaan infrastruktur dasar. Tahun ketiga pelaksanaan RPD diharapkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Landak yang maju, mandiri, dan berdaya saing melalui penguatan fundamental ekonomi dan peningkatan daya saing. Pada tahun akhir implementasi RPD, diharapkan mewujudkan masyarakat Kabupaten Landak yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui pembangunan yang inklusif berbasis ekonomi kerakyatan dan penguatan daya saing. Perwujudan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Landak secara kronologis dideskripsikan melalui tahapan arah kebijakan Kabupaten Landak sebagai berikut.



Gambar 4. 2 Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan (2023-2026) Kabupaten Landak

Sumber: RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026

Berdasarkan pengamatan lingkungan saat ini, dengan mempertimbangkan faktor-faktornya baik secara internal maupun eksternal, maka dirancang Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023 dengan sumber dari sektor-sektor yang sama dengan skala prioritas berdasarkan urutan berikut ini:

1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan;
2. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial;



3. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
4. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
5. Jasa pendidikan;
6. Pengadaan listrik dan gas;
7. Informasi dan komunikasi;
8. Industri pengolahan;
9. Jasa keuangan dan asuransi;
10. Jasa perusahaan;
11. Jasa lainnya;
12. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
13. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
14. Pertambangan dan penggalian;
15. Konstruksi;
16. Real estate;
17. Transportasi dan pergudangan;

Tabel 4. 3 Proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Landak Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Satuan	Proyeksi Tahun 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	68,18
3.	Angka Kemiskinan	%	9,60
4.	Angka Pengangguran (TPT)	%	2,19
5.	Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	%	0,29 – 0,30
6.	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp. (Juta)	33,16

Sumber : Data Badan Pusat Statistik, RPD Kab. Landak Tahun 2023-2026, Penyesuaian dengan Target Provinsi Kalimantan Barat (Rakortekrenbang) dan Hasil Perhitungan

Adapun Rancangan Tema RKPD Kabupaten Landak Tahun 2024 adalah:

“Mewujudkan masyarakat Kabupaten Landak yang maju dan mandiri melalui percepatan penyediaan infrastruktur dasar”

Prioritas pembangunan Kabupten Landak Tahun 2024 diarahkan untuk melaksanakan amanat RPD Kabupten Landak Tahun 2023-2026 guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Acuan utama penentuan prioritas pembangunan Kabupten Landak Tahun 2023 adalah isu strategis, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka



menengah RPD 2023-2026. Selain itu, penentuan prioritas tersebut juga tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat baik evaluasi RPJMN 2020-2024, rancangan RKP Tahun 2024 dan fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Landak Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.
2. Percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian.
3. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjaga daya dukung lingkungan.
4. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat.
6. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
7. Optimalisasi sumberdaya alam untuk peningkatan daya saing daerah.
8. Peningkatan kapasitas dan tatakelola pemerintahan desa.
9. Peningkatan persatuan dan sistem keamanan lingkungan untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024.

Sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.4.



Tabel 4. 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024

SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	OPD
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	Seluruh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan publik, termasuk kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	BPKAD dan BPRD
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	Bappeda, Sekretariat Daerah dan Inspektorat
4. Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Meningkatnya profesionalitas ASN dan tata kelola administrasi kepegawaian yang semakin baik dan berkualitas	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
6. Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan inovasi daerah	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	Bappeda
7. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan dan tugas DPRD	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	Sekretariat DPRD
8. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintah	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	Inspektorat



SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	OPD
10. Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Pembangunan yang akurat dan reliabel	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Terwujudnya Peran Persandian dalam Pelaksanaan Keamanan Informasi	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
14. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	Percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
15. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjaga daya dukung lingkungan.	Dinas Lingkungan Hidup
16. Meningkatkan konektivitas dan keselamatan jaringan transportasi	Percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian.	Dinas Perhubungan
17. Meningkatkan aksesibilitas telekomunikasi dan internet	Percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian.	Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat.	BAPPEDA (Bid. PEFP) & Sekretariat Daerah (Bag. Ekbang)
19. Meningkatkan produktifitas sektor pertanian	Optimalisasi sumberdaya alam untuk peningkatan daya saing daerah.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perkebunan
20. Meningkatkan produksi sektor industri dan perdagangan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
21. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	OPD
22. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Optimalisasi sumberdaya alam untuk peningkatan daya saing daerah.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
23. Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK)
24. Meningkatkan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan kapasitas dan tatakelola pemerintahan desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
25. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik	Peningkatan kapasitas dan tatakelola pemerintahan desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa & Kecamatan (DPMPD)
26. Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan sosial masyarakat di perdesaan	Peningkatan persatuan dan sistem keamanan lingkungan untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa & Kecamatan (DPMPD)
27. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28. Meningkatkan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29. Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
30. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	Dinas Kesehatan
31. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSPPAKB)
32. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSPPAKB)



SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	OPD
33. Meningkatkan Pelayanan penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSPPAKB)
34. Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSPPAKB)
35. Meningkatkan Kapasitas Daerah Menuju Kabupaten Layak Anak	Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSPPAKB)
36. Meningkatkan Keterbukaan Lapangan Kerja	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPD)
37. Meningkatkan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
38. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
39. Meningkatkan budaya olahraga masyarakat	Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
40. Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjaga daya dukung lingkungan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
41. Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan persatuan dan sistem keamanan lingkungan untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024.	Satuan Polisi Pamong Praja
42. Meniadakan Pencegahan dan Penanganan Konflik	Peningkatan persatuan dan sistem keamanan lingkungan untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



4.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan RKP

Prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP 2024 bertumpu pada 7 (tujuh) prioritas nasional. Adapun gambaran keselarasan antara 9 (dua belas) prioritas pembangunan daerah dengan 7 (tujuh) prioritas RKP adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Keselarasan Antara 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Daerah dengan 7 (Tujuh) Prioritas RKP

Proritas Daerah Tahun 2024	Prioritas Nasional Tahun 2024
Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.	
Optimalisasi sumberdaya alam untuk peningkatan daya saing daerah.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
Peningkatan kapasitas dan tatakelola pemerintahan desa.	
Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
Percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian.	Memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjaga daya dukung lingkungan.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
Peningkatan persatuan dan sistem keamanan lingkungan untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024.	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Adapun program-program yang mendukung prioritas pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2024 dan target pembangunan Tahun 2024 yang akan dicapai Kabupaten Landak adalah sebagai berikut :



Tabel 4. 6 Program Prioritas Pembangunan, Sasaran Pembangunan dan Target Tahun 2024 Kabupaten Landak yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional yang Tertuang dalam RKP

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Percepatan penanganan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.	31. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	01.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
			01.06.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	80 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			01.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	100 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			01.06.03 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	60 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
						Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			01.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang ditangani	100 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			01.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pemutakhiran Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	80 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			01.06.06 Program Penanganan Bencana	Persentase Peningkatan Penanganan Bencana	100 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
						an Anak dan Keluarga Berencana
			01.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat.	36. Meningkatkan Keterbukaan Lapangan Kerja	02.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
			02.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Jumlah Pencari Kerja dilatih	5 Orang	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			02.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	20 Orang	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
			02.07.05 Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola yang Layak (memiliki PP/PKB)	7 Perusahaan	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.	37. Meningkatkan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan	02.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
			02.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
			02.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	1 Laporan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
			02.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tertanganinya daerah rawan pangan	13 Kecamatan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
			02.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kab/Kota	1 Dokumen	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat	21. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	02.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah			
			02.17.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	75 Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			02.17.02 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5 Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			02.17.03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			02.17.04 Program Penilaian Kesehatan Ksp/usp Koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	50 Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
		4		dalam daerah kabupaten/kota		Perdagangan
			02.17.05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10 Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			02.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase tingkat kesadaran keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan	30 Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			02.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (umkm)	Meningkatnya rasio pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			02.17.08 Program Pengembangan Umkm	Meningkatnya rasio pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
						Perdagangan
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat	23. Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	02.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
			02.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100 Persen	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			02.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Terlaksananya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Dokumen	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			02.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
			02.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan non perizinan berusaha dan non Berusaha	1868 Izin	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			02.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi	33 Kegiatan Usaha	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			02.18.06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 Dokumen	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berfokus	20. Meningkatkan produksi sektor industri dan perdagangan	03.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
			03.30.02 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan berusaha	90 Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	pada pemberdayaan masyarakat					Perdagangan
			03.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase sarana dan prasarana perdagangan dikelola dengan baik	90 Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			03.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok barang penting	90 Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			03.30.05 Program Pengembangan Ekspor	persentase jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	90 Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			03.30.06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	60 Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
						Perdagangan
			03.30.07 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	90 Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat	20. Meningkatkan produksi sektor industri dan perdagangan	03.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
			03.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Tersusunnya laporan rencana pembangunan industri	1 Dokumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			03.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/kota	#N/A	#N/A	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			03.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustri



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
						an dan Perdagangan
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat	36. Meningkatkan Keterbukaan Lapangan Kerja	03.32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
03.32.03 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
03.32.04 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		#N/A	#N/A	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
18. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah		04.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan	85 %	Sekretariat Daerah	
	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme	3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan	05.01 Perencanaan			
			05.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran dan	85 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	pemerintahan daerah		meningkatnya Evaluasi kinerja		
			05.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen bahan perumusan dan pengambilan kebijakan berupa hasil koordinasi, informasi, pedoman, pustaka, dan arsip tersedia tepat waktu	80 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			05.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembangunan Infrastruktur dan kewilayahan yang terlaksana	60 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Optimalisasi sumberdaya alam untuk peningkatan daya saing daerah.	19. Meningkatkan produktifitas sektor pertanian	03.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan			
			03.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	29 Ton	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
			03.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	899 Ton	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
			03.25.05 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	Dinas Pertanian, Perikanan dan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
						Ketahanan Pangan
			03.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Jenis Olahan Perikanan	7 Jenis	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
	Optimalisasi sumberdaya alam untuk peningkatan daya saing daerah.	22. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	03.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
			03.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	1 lokasi	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
			03.26.03 Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Promosi Pariwisata	1 Kegiatan	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
			03.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual	2 Pelaku Ekraf	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
			03.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	"Jumlah Sumber Daya Pariwisata Ekonomi Kreatif	1 Orang	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
				03.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Optimalisasi sumberdaya alam untuk peningkatan daya saing daerah.	19. Meningkatkan produktifitas sektor pertanian	03.27.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	85 Persen	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
03.27.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota			Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	85 Persen	Dinas Perkebunan	
03.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian			Jumlah Pengadaan Alsintan	520 Unit	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	
03.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian			Jumlah Pengadaan Alsintan	520 Unit	Dinas Perkebunan	
03.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian			Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	265 Unit	Dinas Pertanian, Perikanan dan	



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
		4				Ketahanan Pangan
			03.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	265 Unit	Dinas Perkebunan
			03.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah penyakit ternak yang dicegah dan ditanggulangi	5 Jenis	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
			03.27.05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terkendalinya OPT dan tertanggulangnya bencana	13 Kecamatan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
			03.27.05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terkendalinya OPT dan tertanggulangnya bencana	13 Kecamatan	Dinas Perkebunan
			03.27.06 Program Perizinan Usaha Pertanian	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi standarisasi mutu dan hasil pertanian dan pendataan poktan pengolah TPH	1 Laporan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
			03.27.06 Program Perizinan Usaha Pertanian	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi standarisasi mutu	1 Laporan	Dinas Perkebunan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
				dan hasil pertanian dan pendataan poktan pengolah TPH		
			03.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	156 WKPP	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
			03.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	156 WKPP	Dinas Perkebunan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	27. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas pendidikan	01.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
			01.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	84.55 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			01.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Presentasi meningkatnya pemerataan mutu pada jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs	75 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			01.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	75 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
			01.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Presentasi meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	75 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			01.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Presentasi meningkatnya pelayanan dalam upaya pengendalian perizinan pendidikan	75 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			01.01.06 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Presentasi meningkatnya satuan pendidikan dalam menerapkan bahasa dan sastra	75 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	30. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	01.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
			01.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100 Persen	Dinas Kesehatan
			01.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya	100 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
				evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset		
			01.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	100 Persen	Dinas Kesehatan
			01.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	100 Persen	Rumah Sakit Umum Daerah
			01.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terwujudnya Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	16 Puskesmas	Dinas Kesehatan
			01.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Teroptimalisasinya Upaya Pelayanan Kesehatan	100 Persen	Dinas Kesehatan
			01.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan Promosi kesehatan	100 Persen	Dinas Kesehatan
	Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	34. Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak	02.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
			02.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PUG	100 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
						Keluarga Berencana
			02.08.03 Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan / pendampingan perlindungan perempuan	80 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			02.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Tingkat Kecamatan	5 Kecamatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			02.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Ketersediaan Data Gender dan Anak	100 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
						dan Keluarga Berencana
			02.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (pha)	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			02.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan/Pendampingan Perlindungan Anak	80 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Peningkatan kapasitas dan tatakelola pemerintahan desa.	24. Meningkatkan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,	02.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
			02.13.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya	80 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
		dan pemberdayaan masyarakat desa		evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset		
			02.13.02 Program Penataan Desa	Persentase peningkatan wilayah desa yang ditata	65 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			02.13.03 Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	75 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			02.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa	75 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			02.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rata rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	80 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	33. Meningkatkan Pelayanan penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	02.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
			02.14.02 Program Pengendalian Penduduk	Meningkatnya Program Pengendalian Penduduk	80 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			02.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (kb)	Persentase Peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	13.22 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			02.14.04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (ks)	Persentase Jumlah Poktan (Kelompok Kegiatan) yang mendukung program Bangga Kencana	75 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
						Keluarga Berencana
	Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	38. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	02.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			
02.19.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota			Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
02.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	27.16 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
02.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Persentase prestasi olahraga ditingkat provinsi	15 Persen	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
02.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Jumlah Pembinaan Pramuka	50 Pembinaan	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	28. Meningkatkan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	02.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
02.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan			Persentase jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	75 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
02.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional			Persentase jumlah kesenian tradisional yang dikembangkan	75 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
02.22.04 Program Pembinaan Sejarah			Persentase jumlah pembinaan sejarah yang dilaksanakan	75 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
02.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya			Persentase jumlah cagar budaya dilestarikan dan dikelola	75 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
02.22.06 Program Pengelolaan Permuseuman			Persentase jumlah museum yang dikelola	0 Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM bidang	29. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	02.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	
02.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	pendidikan dan bidang kesehatan.		02.23.03 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno Yang Dilestarikan	6 Eksemplar	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	12. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	02.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
			02.12.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Prosentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang dilaksanakan (%)	95 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			02.12.02 Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			02.12.03 Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			02.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	60 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			02.12.05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid	75 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	4. Meningkatkan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	02.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika			
	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	10. Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Pembangunan yang akurat dan reliabel	02.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			
	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	4. Meningkatkan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan	02.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			
			02.16.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
			02.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase tersedianya sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	70 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	n Teknologi Informasi.	pemerintahan				
		4. Meningkatkan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	02.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase tersedianya keamanan Informasi Pemerintah	50 Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	8. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah	02.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			
			02.24.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Kera, Meningkatnya Evaluasi Kinerja dan Laporan Keuangan / Aset	75 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			02.24.02 Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	75 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
			02.24.03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Keberadaan dan Keutuhan Arsip	75 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			02.24.04 Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	0 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	04.01 Sekretariat Daerah			
			04.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	- Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran - Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota di Bidang Organisasi	100 %	Sekretariat Daerah



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
			04.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu Persentase kerjasama yang aktif Persentase Ketersediaan Dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota di SKPD Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Organisasi Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat Persentase Raperda yang Diundangkan Menjadi Peraturan Daerah	95.5 Persen 95.5 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 98.25 Persen 98 Persen	Sekretariat Daerah
			04.02 Sekretariat Dprd			



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	7. Meningkatkan dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan dan tugas DPRD	04.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	95 %	Sekretariat DPRD
			04.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	95 %	Sekretariat DPRD
	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	05.02 Keuangan			
			05.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	100 Persen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			05.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan	100 Persen	Badan Pajak dan Retribusi Daerah



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
				laporan keuangan/aset		
			05.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Anggaran Yang Disusun Tepat Waktu	100 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			05.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Administrasi dalam Pengelolaan BMD Sesuai Regulasi	100 Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			05.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100 %	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	5. Meningkatkan profesionalitas ASN dan tata kelola administrasi kepegawaian yang semakin baik dan berkualitas	05.03 Kepegawaian			
			05.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	85 Persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			05.03.02 Program Kepegawaian Daerah	Persentase Disiplin ASN	0.51 Persen	Badan Kepegawai



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
						an dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	5. Meningkatkan profesionalitas ASN dan tata kelola administrasi kepegawaian yang semakin baik dan berkualitas	05.04 Pendidikan Dan Pelatihan			
			05.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pemenuhan regulasi pengembangan kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	18.18 Persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man
	Percepatan reformasi birokrasi melalui profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	6. Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan inovasi daerah	05.05 Penelitian Dan Pengembangan			
			05.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang diterapkan	12 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Percepatan reformasi birokrasi melalui	9. Meningkatkan kualitas pembinaan	06.01 Inspektorat Daerah			
			06.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan		Inspektorat



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	profesionalisme aparatur dan pemanfaatan Teknologi Informasi.	dan pengawasan internal pemerintah	06.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan	administrasi perkantoran		
				Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti	100 %	Inspektorat
		3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	06.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Persentase tingkat capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) Kabupaten	75 %
Memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian.	13. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	01.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
			01.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
		14. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembang	01.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda)	Persentase Meningkatnya Ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber daya air	1,29 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
		an ekonomi dalam kondisi baik				
		13. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	01.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	77,49 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
			01.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Persampahan	14.06 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
			01.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan sistem pengelolaan air limbah/sanitasi layak (%)	60,05 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
		14. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	01.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Berkurangnya genangan pada kawasan permukiman (Luas Kawasan Target Yang Ditangani /HA)	1 Hektar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
		dalam kondisi baik				
		13. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	01.03.07 Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	76,45 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
		14. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	01.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase jumlah Kecamatan yang diawasi atas perizinan bangunan gedung dan bangunan atau prasarana bangunan	5 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
			01.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten	69 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
			01.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan kondisi mantab	50.3825 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
			01.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	50 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
						Ruang dan Perumahan
			01.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggara Penataan Ruang	15,65 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
		13. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	01.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/kota yang di Rehabilitasi dan di Relokasi	15 Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
			01.04.03 Program Kawasan Permukiman	Persentase Penyediaan Rumah layak huni yang berhasil ditangani	3 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
			01.04.04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
			01.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (psu)	Persentase Penyediaan Perumahan layak huni	100 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
				02.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
	Percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian.	14. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik	02.10.05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	55 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
			02.10.10 Program Penatagunaan Tanah	Persentase Pembebasan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah untuk menunjang pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	55 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
	Percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian.	16. Meningkatkan konektivitas dan keselamatan jaringan transportasi	02.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
			02.15.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	95 Persen	Dinas Perhubungan
			02.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (llaj)	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan yang tersedia	80 Persen	Dinas Perhubungan
			02.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran			Dinas Perhubungan



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjaga daya dukung lingkungan.	40. Terwujudnya masyarakat tangguh bencana	01.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
			01.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	91 Persen	Satuan Polisi Pamong Praja
			01.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	91 Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			01.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Tingkat Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Sedang Risiko	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			01.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pencegahan penanggulangan penyelamatan dan kebakaran	100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
			01.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pencegahan penanggulangan penyelamatan dan kebakaran	100 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjaga daya dukung lingkungan.	15. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	02.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
			02.11.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	98 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
			02.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			02.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya Data Kualitas Lingkungan Hidup dan Konservasi Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			02.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Persentase Luas RTH yang tersedia	65 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
			02.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (b3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3)	jumlah Layanan Izin dan/atau Layanan Pemeriksaan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan	20 Izin Usaha	Dinas Lingkungan Hidup



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
		4		Sementara Limbah B3 dan Persetujuan Teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten		
			02.11.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh)	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, PUULH yang Diterbitkan oleh Pemerintah	70 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
			02.11.07 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	"Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif "	2 Lembaga	Dinas Lingkungan Hidup
			02.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Yang Dilaksanakan	98 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
			02.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Perolehan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
			02.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
			02.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	70 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan persatuan dan sistem keamanan lingkungan untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024.	41. Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	08.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik			
			08.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	97 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			08.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Desa Berkarakter Pancasila	10 Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			08.01.05 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			01.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	100 Persen	Satuan Polisi Pamong Praja



PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	Urusan/bidang Urusan/program	INDIKATOR	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
		42. Meniadakan Konflik Sosial	08.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan Kriteria yang berlaku	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			08.01.04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang aktif	97 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			08.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase realisasi kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan konflik daerah	100 Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



4.4. Sinkronisasi Sasaran Pembangunan dan Target Kinerja Kabupaten Landak dengan Sasaran Pembangunan dan Target Kinerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

N/A



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 disajikan pada Lampiran Tabel 5.1. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.



Tabel 5. 1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Landak



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Landak dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2024.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Landak disajikan pada Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Landak Tahun 2024. Pada tabel ini disajikan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026. Sedangkan IKK Kabupaten Landak disajikan pada Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Landak Tahun 2024. Tabel ini memuat berbagai indikator kinerja berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Tabel 6. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Landak Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	REALIASASI KINERJA TAHUN 2023	TARGET CAPAIAN KINERJA		KONDISI AKHIR TAHUN 2026
			2024	2025	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,51	89,30	89,90	90,02
2	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B
3	Nilai SAKIP	B	B	B	B
4	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	0,50	0,54	0,55	0,57
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,56	65,86	65,96	66,06
6	Presentase Pertumbuhan Ekonomi	4,89	4,94	4,88-5,20	5,76
7	Indeks Desa Membangun	0,7135	0,751	0,7635	0,7760
8	Persentase Tingkat Kemiskinan	10,01	9,60	9,34	8,86
9	Indeks Pembangunan Manusia	67,17	68,01	68,80	68,86

Sumber : RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 dan hasil perhitungan penyesuaian tahun 2024



Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	4,98	4,94	5,02	5,76
1.2	Laju Inflasi	%	1,16	3,56	3,42	3,11
1.3	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp. (Juta)	29,21	33,77	34,14	35,76
1.4	Indeks Gini	Indeks	0.310	0.296	0.295	0.295
1.5	Persentase Tingkat Kemiskinan	%	10,01	9,60	9,26	8,86
1.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,51	89,30	89,90	90,02
1.7	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	4,86	6,23	6,48	6,72
1.8	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
1.9	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	Skor	75,6	70,0	70,5	70,0
1.10	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	%	404,55	200,00	210,00	220,00
1.11	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	%	36,13	21,68	22,12	22,56
1.12	Angka Produksi Sektor Pertanian	Ton/Tahun	372.982	137.159	139.366	361.903
1.13	Rata-Rata Persentase Tingkat Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan	%	34,45	34,80	35,00	40,00
1.14	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	2,28	2,43	2,48	2,53
2	Fokus Kesejahteraan Sosial					
2.1	Pendidikan					
2.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	67,17	68,01	68,80	68,86
2.1.2	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	99,26	99,42	99,42	99,66
2.1.3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,15	7,16	7,16	7,17
2.2	Kesehatan					
2.2.1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,39	73,53	73,65	73,85
2.2.2	Persentase Balita Gizi Buruk (Sangat Kurus)	%	15,10	7,00	7,00	7,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
2.2.3	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	22,40	12,00	12,00	12,00
2.3	Ketenagakerjaan					
2.3.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	96,78	96,78	96,80	73,00
2.3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,22	1,70	1,60	3,09
B.	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah					
1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Juta Rp	1.003,79	1.078,85	1.092,15	1.179,45
1.2	Nilai Tukar Petani	%	96,00	96,30	96,60	97,20
1.3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	Juta Rp	462,85	487,6	498,15	559,4
1.4	Indeks Gini	Indeks	0.310	0.296	0.296	0.295
2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
2.1	Perhubungan					
2.1.1	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Transportasi	%	44,44	66,66	77,77	90,00
2.1.2	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penumpang Angkutan	%	10,00	50,00	55,00	60,00
2.1.3	Persentase Ketersediaan Jumlah Dermaga, Tambatan Perahu	%	90,19	9411,00	96,07	100,00
2.2	Penataan Ruang					
2.2.1	Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur Terhadap Tata Ruang	%	40,00	60,00	68,00	98,00
3	Fokus Iklim Berinvestasi					
3.1	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2	Persentase Potensi Gangguan / Konflik yang Teratasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Faktor Sumber Daya Manusia					
4.1	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	99,26	99,42	99,5	99,66



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
4.2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,15	7,16	7,17	7,17
4.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,19	72,00	72,50	73,00
4.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,78	1,70	1,66	3,09
C.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Pendidikan Dasar					
1.1	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	12,44	12,45	12,46	12,49
1.2	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	7,12	7,15	7,16	7,17
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	32,75	32,99	33,10	33,10
1.3.1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	35,20	35,92	36,20	36,20
1.4	Angka Partisipasi Kasar	%	100,03	100,04	100,05	100,06
1.4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100,03	100,02	100,02	100,01
1.4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	100,02	100,06	100,08	100,10
1.5	Angka Partisipasi Murni	%	94,34	96,13	97,05	97,99
1.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,98	99,99	99,99	99,99
1.5.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88,70	92,27	94,11	95,99
1.6	Angka Partisipasi Sekolah	%	99,35	99,53	95,66	96,83
1.6.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	98,68	99,00	91,23	93,56
1.6.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	100,02	100,06	100,08	100,1
1.7	Angka Putus Sekolah	%	0,09	0,08	0,07	0,05
1.7.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,14	0,13	0,12	0,10
1.7.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,04	0,03	0,02	0,00
1.8	Rasio guru terhadap murid	Rasio	34,03	34,28	34,35	34,61
1.8.1	Rasio guru terhadap murid SD/MI	Rasio	31,33	31,10	30,50	29,50
1.8.2	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	Rasio	36,72	37,45	38,19	39,72
1.9	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata	Rasio	20,08	20,03	19,98	19,88
1.9.1	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata SD/MI	Rasio	20,20	20,15	20,10	20,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
1.9.2	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata SMP/MTs	Rasio	19,95	19,90	19,85	19,75
1.10	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Rasio	78,14	77,32	76,60	73,86
1.10.1	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	Rasio	101,05	98,30	95,74	89,13
1.10.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	Rasio	55,23	56,33	57,45	58,59
1.11	Angka Kelulusan	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.11.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.11.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	Angka Melanjutkan (AM)	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.13	Fasilitas Pendidikan	%	83,93	88,43	92,93	97,93
1.13.1	Ruang Kelas yang Kondisi Bangunannya Baik SD/MI	%	87,86	91,86	95,86	95,86
1.13.2	Ruang Kelas yang Kondisi Bangunannya Baik SMP/MTs	%	80,00	85,00	90,00	100,00
1.14	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	99,26	99,33	99,42	99,66
1.15	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	50,46	50,83	51,30	52,01
1.16.1	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Sekolah Dasar	%	21,92	22,35	22,8	23,72
1.16.2	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Sekolah Menengah	%	79,00	79,30	79,80	80,30
1.17	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Bersertifikat Pendidik (Termasuk PPG Model Baru)	%	27,17	30,21	33,39	38,75
1.17.1	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Bersertifikat Pendidik (Termasuk PPG Model Baru) PAUD	%	2,41	2,45	2,50	2,60
1.17.2	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Bersertifikat Pendidik (Termasuk PPG Model Baru) Sekolah Dasar	%	38,27	43,27	48,27	53,87



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
1.17.3	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Bersertifikat Pendidik (Termasuk PPG Model Baru) Sekolah Menengah	%	40,84	44,92	49,41	59,78
1.18	Persentase Guru yang Mengikuti Pelatihan Guru Penggerak	%	8,92	13,13	19,80	25,85
1.18.1	Persentase Guru yang Mengikuti Pelatihan Guru Penggerak PAUD	%	0,34	0,35	0,36	0,38
1.18.2	Persentase Guru yang Mengikuti Pelatihan Guru Penggerak Sekolah Dasar	%	0,16	10,16	20,16	30,16
1.18.3	Persentase Guru yang Mengikuti Pelatihan Guru Penggerak Sekolah Menengah	%	26,25	28,87	38,87	47,02
1.19	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Menerima Penghargaan dan Perlindungan	%	21,67	25,29	29,21	37,05
1.19.1	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Menerima Penghargaan dan Perlindungan PAUD	%	3,94	4,01	4,09	4,25
1.19.2	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Menerima Penghargaan dan Perlindungan Sekolah Dasar	%	0,30	5,03	10,03	15,03
1.19.3	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Menerima Penghargaan dan Perlindungan Sekolah Menengah	%	60,77	66,84	73,52	91,87
1.20	Persentase Satuan Pendidikan yang Memperoleh BOS dan Melaporkan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.20.1	Persentase Satuan Pendidikan yang Memperoleh BOS dan Melaporkan Tepat Waktu Sekolah Dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.20.2	Persentase Satuan Pendidikan yang Memperoleh BOS dan Melaporkan Tepat Waktu Sekolah Menengah	%	100,00	100,00	100,00	100,00
1.21	Jumlah Satuan Pendidikan Menjadi Sekolah Penggerak	Jumlah	10	10	10	10
2	Kesehatan					
2.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,39	73,53	73,65	73,79
2.2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Orang	194	183	183	183
2.3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Orang	17	16	16	16
2.4	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	Orang	21	16	16	16
2.5	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
2.6	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	22,40	13,00	12,00	12,00
2.7	Persentase Balita Gizi Buruk (Sangat Kurus)	%	15,10	7,30	7,00	7,00
2.8	Persentase Rumah Tangga yang Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	65,00	70,00	75,00	85,00
2.9	Persentase Desa/Kelurahan yang Mencapai UCI \geq 90%	%	79,00	83,00	87,00	95,00
2.10	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%				
2.11	Non Folio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Orang	4	4	4	4
2.12	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)	%	85,00	86,00	87,00	90,00
2.13	Tingkat Prevalensi Penderita Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	Orang	231	211	190	180
2.14	Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	Orang	31	29	27	22
2.15	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkolosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS	%	75,00	78,00	80,00	85,00
2.16	Proporsi Kasus Tuberkolosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	%	85,00	85,00	86,00	87,00
2.17	Persentase Kasus Covid 19 yang Tertangani	%	90,00	90,00	90,00	90,00
2.18	Persentase Pencegahan Penyakit HIV/AIDS	%	60,00	63,00	65,00	70,00
2.19	Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir	%	50,00	52,00	53,00	55,00
2.20	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS	%	55,00	55,00	56,00	58,00
2.21	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2.22	Penderita Diare yang Ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2.23	Angka Kejadian Malaria	Orang	< 1/1000 penduduk	< 1/1000 penduduk	< 1/1000 penduduk	< 1/1000 penduduk
2.24	Tingkat Kematian Akibat Malaria	Orang	1	0	0	0
2.25	Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2.26	Persentase Capaian Desa ODF (Open Defecation Free) / Persentase Kepemilikan Jamban	%	60,00	75,00	80,00	90,00
2.27	Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) yang Mendapatkan Pengobatan	%	60,00	64,00	68,00	76,00
2.28	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pengobatan	%	20,00	30,00	40,00	60,00
2.29	Persentase Penderita ODGJ Ditangani Sesuai Standar	%	60,00	65,00	70,00	80,00
2.30	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin		100,00	100,00	100,00	100,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
2.31	Persentase Jumlah Puskesmas yang Sudah Terakreditasi	%	87,50	100,00	100,00	100,00
2.32	Persentase 1 Rumah Sakit di Kabupaten Landak yang Terakreditasi Paripurna	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2.33	Persentase Terlaksananya Pengadaan Obat, Sediaan Farmasi dan BMHP Sesuai dengan RKO		72,00	92,00	92,00	95,00
2.34	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Bayi	9	8	7	5
2.35	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Per 1000 Balita	152	153	154	156
2.36	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	36	37	38	40
2.37	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	0,25	0,30	0,30	0,35
2.38	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	4	6	8	12
2.39	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	87	90	92	95
2.40	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	97	98	99	100
2.41	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2.42	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	31,36	34,36	36,36	41,36
2.43	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	85,00	90,00	93,00	97,00
2.44	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	99,20	99,40	99,60	100,00
2.45	Cakupan Pelayanan Nifas	%	91,52	92,50	93,00	95,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1	Pekerjaan Umum					
3.1.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	62,00	64,00	65,00	65,00
3.1.2	Cakupan Kinerja Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	56,00	61,00	63,00	67,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
3.1.3	Persentase Rumah Tangga yang Terakses Air Minum	%	76,49	78,49	79,48	80,70
3.1.4	Persentase Rumah Tangga yang Terakses Pelayanan Air Limbah Domestik	%	57,05	61,55	63,05	65,50
3.1.5	Persentase Sarana dan Prasarana Persampahan	%	14,00	15,56	16,06	17,00
3.1.6	Persentase Volume Layanan Air untuk Meningkatkan Produktivitas Irigasi	%	50,00	2,05	2,05	58,20
3.1.7	Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Kabupaten	%	0,49	0,57	0,61	0,65
3.1.8	Persentase Jalan Kondisi Mantab	%	46,43	47,93	48,43	48,93
3.1.9	Persentase Jembatan Kondisi Baik	%	58,24	59,74	60,24	60,74
3.1.10	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	20,00	25,00	25,00	100,00
3.1.11	Persentase Peningkatan Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	%	35,00	50,00	50,00	100,00
3.1.12	Persentase Jalan Lingkungan dan Jembatan yang Direhab dan Dibangun	%	73,45	79,45	82,45	85,50
3.1.13	Persentase Jumlah Perizinan Bangunan Gedung dan Bangunan atau Prasarana Bangunan yang Diterbitkan	%	N/A	10,00	15,00	22,00
3.1.14	Persentase Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	%	64,00	74,00	79,00	85,00
3.2	Penataan Ruang					
3.2.1	Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur Terhadap Tata Ruang	%	40,00	68,00	76,00	98,00
4	Perumahan Rakyat dan Permukiman					
4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	%	62,00	64,00	65,00	65,00
4.2	Cakupan Kinerja Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	56,00	61,00	63,00	67,00
4.3	Persentase Rumah Layak Huni yang Terdampak Bencana atau Terkena Relokasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00
4.4	Persentase Penyediaan Perumahan Layak Huni	%	100,00	100,00	100,00	100,00
4.5	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	%	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
5.1	Cakupan Pengendalian Gangguan Ketentraman, Ketertiban, Penegakan PERDA, dan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	%	95,00	97,00	98,00	99,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
5.2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Resiko Sedang	Resiko Sedang	Resiko Sedang	Resiko Sedang
5.3	Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk atau (Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas))	%	48,23	48,23	48,23	48,23
5.4	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100,00	130,00	143,00	158,00
5.5	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	%	89,00	88,00	89,00	97,00
5.6	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	15	15
5.7	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00
5.8	Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kab/Kota yang Ditangani	%	40,00	70,00	80,00	85,00
5.9	Persentase Jumlah Warga yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	%	22,73	70,00	80,00	85,00
5.10	Jumlah Poskamling	Jumlah	156	161	166	172
5.11	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per-Jumlah 10.000 Penduduk	Rasio	16,82	48,23	48,23	48,23
5.12	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	Jumlah	240	282	311	343
5.13	Persentase Warga yang Memperoleh Pelayanan Penanganan Kebakaran, Evakuasi Korban dan Penyelamatan	%	95,00	100,00	100,00	100,00
5.14	Persentase Pembentukan Pokmas/Destana di Daerah Rawan Bencana	%	80,00	79,00	87,00	88,00
5.15	Persentase Jumlah Orang yang Dilatih/Diberikan Pengetahuan Kebencanaan	%	79,00	86,00	89,00	94,00
5.16	Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	Jam	6	6	6	6
5.17	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Pasca Bencana	%	97,00	88,00	89,00	95,00
6	Sosial					
6.1	Persentase PPKS yang Tertangani	%	99,76	100,00	100,00	100,00
6.2	Validas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	%	69,80	80,00	85,00	90,00
6.3	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	52,81	85,50	85,80	89,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
6.4	Persentase PPKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00
6.5	Persentase Tingkat Kemiskinan	%	10,01	9,60	9,26	8,86
6.6	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) yang Dilakukan Pemeliharaan	Buah	0	2	2	2
7	Tenaga Kerja					
7.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,78	1,70	1,50	3,09
7.2	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%	42,50	42,90	43,10	43,30
7.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,19	72,00	72,50	73,00
7.4	Persentase Perusahaan Besar yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak (Memiliki PP/PKB)	%	59,60	60,00	60,20	60,40
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00
8.2	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00
8.3	Kategori Kabupaten / Kota Layak Anak	Kategori	Inisiasi	Pratama	Madya	Madya
8.4	Rasio KDRT	Per 1000 Perempuan	1,08	1,06	1,04	1,00
8.5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100,00	100,00	100,00	100,00
8.6	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%	0,014	0,013	0,012	0,100
8.7	Persentase OPD yang Melaksanakan PPRG dan PUG	%	100,00	100,00	100,00	100,00
8.8	Persentase Puspaga Aktif	%	N/A	50,00	55,00	65,00
8.9	Kapasitas Perangkat Daerah dalam Menyediakan Data Gender dan Anak	%	100,00	100,00	100,00	100,00
8.10	Capaian Indikator KLA	%	50,00	60,00	61,00	63,00
9	Pangan					
9.1	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	Skor	75,6	70,0	70,5	70,0



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
9.2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	%	404,55	200,00	210,00	220,00
10	Pertanahan					
10.1	Cakupan Kinerja Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi	%	56,00	61,00	63,00	67,00
10.2	Persentase Ketersediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	%	3,40	65,00	70,00	83,20
11	Lingkungan hidup					
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,56	65,86	65,96	66,06
11.2	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11.4	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
11.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	53,00	53,30	53,40	53,50
11.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	95,03	95,33	95,53	95,53
11.7	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	32,62	32,92	33,02	33,12
11.8	Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	47,00	60,00	65,00	70,00
11.9	Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah	0	2	2	2
11.10	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
11.11	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	12321,67	13821,67	14571,67	15321,67
11.12	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	168265	183265	190765	198265
11.13	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	50,36	57,36	60,86	64,36
11.14	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	74,94	78,94	80,94	82,94
12	Kependudukan dan Catatan Sipil					
12.1	Persentase Kepemilikan Data Kependudukan	%	57,01	58,48	59,00	59,67



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
12.2	Persentase Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	69,65	72,30	73,30	74,85
12.3	Persentase Surat Keterangan Kependudukan	%	59,00	62,00	63,00	64,00
12.4	Persentase Akta Pencatatan Sipil	%	6,82	71,80	74,10	79,85
12.5	Persentase Biodata Penduduk	%	0,38	0,40	0,41	0,42
12.6	Persentase Kartu Keluarga	%	99,00	99,20	99,30	99,40
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
13.1	Jumlah Desa Mandiri	Desa Mandiri	13	23	28	34
13.2	Persentase BUMDes Sehat	%	N/A	6	8	8
13.3	Persentase Tim Penggerak PKK Tingkat Desa Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00
13.4	Prosentase Penyusunan LPPDES, LKPPDES, IPPDES, LPRP-APBDES, LKPRP-APBDES, DAN IPRP-APBDES tepat waktu dan akuntabel	%	N/A	33,67	34,67	39,00
13.5	Persentase Karang Taruna Aktif	%	N/A	3,20	4,48	6,41
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
14.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,83	1,87	1,89	1,91
14.2	Unmeet Need KB	%	29,31	27,51	26,61	25,66
14.3	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,59	2,51	2,4	2,23
14.4	Rasio Akseptor KB	%	81,45	82,21	83,33	85
14.5	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	81,45	82,21	83,33	85
14.6	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (ASFR 15-90)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun	79,76	72,15	67,92	41,97
14.7	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	%	N/A	48,57	49,21	51,58
15	Perhubungan					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
15.1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Jumlah penumpang	26.817	45.798	48.088	50.492
15.2	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Transportasi	%	44,44	77,77	88,88	90,00
15.3	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum terhadap Jumlah Penumpang Angkutan	%	10,00	55,00	55,00	60,00
15.4	Persentase Ketersediaan Jumlah Dermaga, Tambatan Perahu	%	90,19	96,07	98,03	100,00
15.5	Persentase Kendaraan yang Lulus Uji	%	50,00	65,00	70,00	75,00
15.6	Persentase Trayek Angkutan Umum yang Tersedia	%	65,00	85,00	90,00	100,00
15.7	Persentase Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	%	67,26	86,90	93,45	100,00
15.8	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Jumlah	1.539	1.874	1.968	2.066
15.9	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	Jumlah	1	1	1	1
15.10	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Jumlah	6.714	7.323	7.689	8.073
15.11	Jumlah Orang/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun	Jumlah	N/A	37.568	39.446	41.418
15.12	Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun	Jumlah	37.710	41.133	42.844	44.555
15.13	Jumlah Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun	Jumlah	6.000	15.522	16.083	16.644
16	Komunikasi dan Informatika					
16.1	Jumlah SPBE yang Dibangun dan Dikembangkan untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah SPBE	67	73	75	77
16.2	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	14,29	42,86	57,14	71,43
16.3	Jumlah Website yang Dikelola dan Dikembangkan Pemerintah Daerah	Jumlah Website	41	47	49	51
16.4	Persentase Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Layanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah	%	100,00	100,00	100,00	100,00
16.5	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	%	40,10	50,00	55,00	60,00



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
16.6	Persentase Pemanfaatan Teknologi , Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	%	85,71	100,00	100,00	100,00
16.7	Predikat Penilaian SPBE	Predikat	Cukup	Baik	Baik	Sangat Baik
16.8	Persentase Menurunnya Daerah/Wilayah yang Blank Spot	%	42,31	35,90	30,77	24,36
16.9	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	%	2,63	52,63	92,10	100,00
16.10	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	83,00	87,00	89,00	92,00
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
17.1	Rasio Keanggotaan Koperasi	Rasio/%	N/A	8,50	10,50	12,56
17.2	Rasio Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Rasio/%	N/A	34,85	36,85	38,85
18	Penanaman Modal					
18.1	Nilai Investasi di Kabupaten	Milyar Rp	700,780	565,433	621,970	684,173
18.2	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah	1.832	1.905	1.943	1.982
19	Kepemudaan dan Olahraga					
19.1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	%	27,16	29,62	32,09	34,56
19.2	Jumlah Olahraga Rekreasi yang Dikembangkan	Jenis	1	2	3	3
19.3	Jumlah Pemuda yang Dibina	Orang	278	282	285	288
19.4	Prestasi Olahraga Pelajar yang Diperoleh	Cabor	0	1	2	6
19.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga yang Tersedia	Unit	1	2	2	8
20	Statistik					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
20.1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	100,00	100,00	100,00	100,00
20.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00
20.3	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00
20.4	Persentase Data Statistik yang Tersusun dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Persandian					
21.1	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	23,72	24,25	24,50	24,75
21.2	Persentase Pengamanan Informasi Daerah Yang Terselenggara Dengan Baik	%	23,72	24,25	24,50	24,75
22	Kebudayaan					
22.1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah	40	47	54	61
22.2	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah	N/A	7	7	7
22.3	Jumlah Sanggar Seni Budaya yang Berprestasi	Jumlah	N/A	7	7	7
22.4	Jumlah Peserta yang Mengikuti Expo Budaya Seni Tari Dayak	Jumlah	327	331	333	335
22.5	Jumlah Peserta yang mengikuti Sastra Lisan (Singara/Cerita Rakyat)	Jumlah	30	40	45	50
22.6	Jumlah kesenian (Jonggan) Seni Dayak	Jumlah	15	19	21	23
22.7	Jumlah peserta yang mengikuti Sendra Tari Dayak	Jumlah	110	130	140	150
22.8	Jumlah Warisan Cagar Budaya (Benda) yang Dilestarikan	Jumlah	30	40	45	50
22.9	Jumlah Warisan Cagar Budaya Tak Benda (WBTB)	Jumlah	10	14	16	18
23	Perpustakaan					
23.1	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks	N/A	Rendah	Rendah	Rendah
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	N/A	1,7	2,0	2,2
23.3	Jumlah Tenaga Pengelola dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang Dibina	Jumlah	N/A	28	32	36
23.4	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Jumlah	N/A	2.500	2.700	3.000
23.5	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	Jumlah	N/A	29.052	29.778	30.522



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
23.6	Jumlah Koleksi Daerah yang Dilestarikan	Jumlah	N/A	3	3	3
24	Kearsipan					
24.1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Kategori	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup
24.2	Persentase Ketersediaan Arsip Daerah Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban	%	N/A	65,00	70,00	75,00
24.3	Persentase Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban	%	N/A	40,00	50,00	60,00
24.4	Jumlah Unit Kearsipan yang Dibina	Jumlah	N/A	5	5	5
24.5	Jumlah Perangkat Daerah yang Diaudit	Jumlah	N/A	10	10	10
24.6	Jumlah Pengguna Layanan Akses Arsip Statis Terbuka	Jumlah	N/A	5	5	5
25	Pariwisata					
25.1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	%	2,28	2,43	2,48	2,53
25.2	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	%	0	9	11	13
25.3	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegera (Orang)	Jumlah	59.977	62.000	62.500	63.000
25.4	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pelatihan/Bantuan	Jumlah	0	2	2	2
26	Pertanian					
26.1	Angka Produksi Sektor Pertanian	Ton/Tahun	372.982	137.159	139.366	361.903
26.2	Rata-Rata Persentase Tingkat Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan	%	34,45	30,00	35,00	40,00
26.3	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	%	36,13	21,68	22,12	22,56
26.4	Produktivitas Padi	Kw/Ha	39,19	108.636,00	110.809,00	38,70
26.5	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	93,80	90,75	91,00	91,25
26.6	Nilai Tukar Petani	%	96,00	96,30	96,90	97,20
26.7	Produksi Jagung	Ton	41.936,25	23.541,31	23.776,72	24.014,49
26.8	Produksi Daging Ternak	Ton	6.206,95	5.612,25	5.436,85	5.545,58
26.9	Jumlah Kelembagaan Pertanian	Jumlah	3427	3594	3701	3807



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
26.10	Persentase perencanaan pembangunan perkebunan yang tercapai	%	50,00	0,70	0,80	0,90
26.11	Persentase data dan informasi pembangunan perkebunan Persentase yang akurat dan mutakhir	%	80,00	0,90	0,95	0,95
26.12	Peningkatan luasan pembangunan perkebunan	Ha	0,0	50,0	50,0	200,0
26.13	Jumlah Produktivitas Perkebunan Karet	Kg/Ha/Tahun	753,5	750,0	750,0	750,0
26.14	Jumlah Produktivitas Perkebunan kelapa sawit	Kg/Ha/Tahun	2430,2	2000,0	2200,0	2500,0
26.15	Jumlah Produktivitas Perkebunan Kopi	Kg/Ha/Tahun	517,2	457,0	457,0	457,0
26.16	Jumlah Produktivitas Perkebunan Kakao	Kg/Ha/Tahun	428,9	500,0	500,0	500,0
26.17	Jumlah Produktivitas Perkebunan Lada	Kg/Ha/Tahun	572	600,0	600,0	600,0
27	Perdagangan					
27.1	Nilai Transaksi Domestik	Rp	N/A	566.092.800	679.311.360	815.173.632
27.2	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Dikelola Dengan Baik	%	N/A	54,28	58,28	62,28
28	Perindustrian					
28.1	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Industri	%	9,05	32,11	37,11	42,11
29	Transmigrasi					
29.1	Persentase Koordinasi Transmigrasi Lokal	%	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Kelautan dan Perikanan					
30.1	Produksi Hasil Perikanan	Ton	1084,13	934,00	940,00	946,00
30.2	Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Thn	33,5	34,0	35,0	36,0
31	Perencanaan					
31.1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	%	19,90	21,50	22,00	22,50
31.2	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	%	15,50	17,50	18,00	18,50



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
31.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
31.4	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
31.5	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
31.6	Persentase Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat dan Mutakhir	%	68,00	90,00	100,00	100,00
31.7	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra-PD	%	100,00	100,00	100,00	100,00
31.8	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja-PD	%	100,00	100,00	100,00	100,00
31.9	Persentase Konsistensi Program RPJMD dan RKPD	%	99,73	100,00	100,00	100,00
31.10	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	95,41	95,00	95,00	95,00
31.11	Tingkat Pengukuran Kinerja Sasaran Pembangunan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	%	70 (Data 2020)	65,00	70,00	75,00
31.12	Tingkat Pengukuran Kinerja Sasaran Pembangunan Bidang Perkonomanian dan Sumber Daya Alam	%	100 (Data 2020)	85,00	87,00	90,00
31.13	Tingkat Pengukuran Kinerja Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	%	100 (Data 2020)	80,00	85,00	90,00
32	Keuangan					
32.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
32.2	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	%	21,78	32,26	33,86	35,87
32.3	Ketepatan Waktu Penyusunan Perda dan Perbup APBD serta Perda dan Perbup Perubahan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
32.4	Persentase Kesesuaian Penganggaran terhadap Perencanaan	%	133,00	100,00	100,00	100,00
32.5	Persentase Ketepatan Penatausahaan Keuangan Daerah	%	77,35	100,00	100,00	100,00
32.6	Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
32.7	Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
32.8	Persentase Kesesuaian LK SKPD dan LK Konsolidasi dengan SAP dan Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya	%	N/A	100,00	100,00	100,00
32.9	Persentase Pengguna Barang yang Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	100,00	100,00	100,00	100,00
32.10	Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	%	76,56	100,00	100,00	100,00
32.11	Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	%	92,53	100,00	100,00	100,00
33	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan					
33.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	46,34	55,00	60,00	65,00
33.2	Persentase Tata Kelola Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	%	53,35	73,15	67,87	78,69
33.3	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Pendidikan Dan Pelatihan	%	2,60	5,12	6,40	21,81
33.4	Persentase Pendidikan Lanjutan yang Memiliki Nilai Minimal Baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00
33.5	Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Pegawai dengan Nilai Minimal Baik	%	80,00	81,00	82,00	83,00
33.6	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	%	0,15	0,46	0,41	0,36
33.7	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian	%	84,37	86,00	87,00	88,00
33.8	Persentase Data ASN yang Dimuktahirkan	%	44,45	83,25	69,04	95,10
33.9	Persentase Regulasi Kepegawaian yang Diselesaikan Secara Tepat dan Akurat	%	9,09	27,27	27,27	100,00
34	Penelitian dan Pengembangan					
34.1	Persentase Hasil Litbang yang Diterapkan	%	10,00	13,00	14,00	15,00
34.2	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
35	Pengawasan					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
35.1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai	2	2	2	2
35.2	Level kapabilitas APIP	Level	2	2	2	2
35.3	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	%	14,18	16,00	16,50	17,00
35.4	Persentase Berkurangnya Jumlah Temuan	%	82,75	73,00	77,00	80,00
35.5	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0,15	0,46	0,41	0,36
35.6	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Selesai Ditindaklanjuti	%	97,00	82,00	84,00	85,00
35.7	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti	%	68,50	65,00	70,00	75,00
35.8	Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti	%	N/A	100,00	100,00	100,00
35.9	Persentase Jumlah OPD yang Memenuhi Standar untuk Diusulkan Memperoleh Predikat WBK/WBBM	%	N/A	8,00	10,00	12,00
35.10	Persentase Pegawai yang Menyampaikan LHKASN	%	N/A	80,00	85,00	90,00
35.11	Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B	%	25,00	53,00	55,00	60,00
36	Sekretariat Daerah					
36.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,51	89,30	89,90	90,02
36.2	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	%	8,81	10,5	11	11,5
36.3	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Capaian	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
36.4	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	B
36.5	Laju Inflasi (%)	%	1,16	3,56	3,42	3,11
36.6	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	(juta Rp.)	29,21	32,97	34,14	35,76
36.7	Indeks Gini	Rasio	0,206	0,206	0,205	0,205
36.8	Rata - Rata Nilai Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Baik	Sedang	Tinggi	Tinggi
36.9	Persentase Penataan Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	%	95,00	100,00	100,00	100,00
36.10	Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	
36.11	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama (Januari-Maret)	%	0	0	0	0
36.12	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	%	15,21	11,00	10,00	8,00
36.13	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Rasio/%	47,17	60,00	65,00	70,00
36.14	Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Sesuai Standar Pelayanan	%	100,00	100,00	100,00	100,00
36.15	Persentase Pelayanan Pimpinan Daerah dan Tamu Pimpinan Sesuai Standar Pelayanan	%	100,00	100,00	100,00	100,00
36.16	Persentase Jumlah Bantuan Hibah dan Sosial yang Disalurkan	%	95,00	98,03	98,04	98,05
36.17	Jumlah BUMD Yang Terfasilitasi	Jumlah	2	2	2	2
37	Sekretariat Dewan					
37.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
37.2	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
37.3	Terintegrasinya Program- Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
37.4	Jumlah Perda Inisiatif Yang Ditetapkan	Jumlah	4	4	4	4
37.5	Jumlah Rekomendasi Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Mitra Kerja	Jumlah	9	9	9	9

Sumber : RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 dan hasil perhitungan penyesuaian tahun 2023



BAB VII P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Landak Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari tahun kedua RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026. Pembangunan pada Tahun 2024 memiliki tema atau fokus **“Mewujudkan masyarakat Kabupaten Landak yang maju dan mandiri melalui percepatan penyediaan infrastruktur dasar”**. Perencanaan pembangunan tahun kedua ini diharapkan menjadi pijakan yang kokoh dalam mencapai target-target pembangunan.

Perubahan atas Dokumen RKPD Tahun 2024 disusun sebagai pedoman dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.



Perubahan RKPD Tahun 2024 ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Landak khususnya Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai pada Triwulan II (Triwulan Kedua) Tahun 2024 dimana terjadi penambahan dan/atau pengurangan Program dan Kegiatan dengan tetap memperhatikan target capaian kinerja.

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128199402 2 001